

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Dian Maulidia
NIM: 18312031

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Dian Maulidia

NIM: 18312031

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


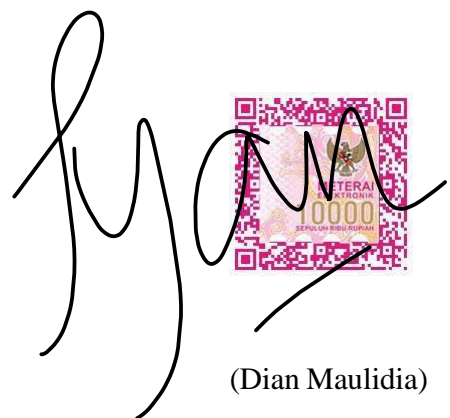
YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 8 Desember 2023



(Dian Maulidia)

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Dian Maulidia

NIM: 18312031

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



(Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.)

PENGESAHAN UJIAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan untuk
memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana jenjang Strata 1 pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Nama: Dian Maulidia
Nomor Mahasiswa: 18312031
Program Studi: Akuntansi

Yogyakarta, Desember 2023
Disahkan oleh,

Pembimbing Skripsi: Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.
Penguji: Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kalimantan

Disusun oleh: DIAN MAULIDIA

Nomor Mahasiswa: 18312031

Telah dipertahankan didepan Tim
Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari,
tanggal: Selasa, 12 Desember 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

Penguji : Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas
Bisnis dan
Ekonomika
Universitas Islam
Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

“Things never happen the same way twice.”

(C.S. Lewis)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dan berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kalimantan. Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (S-1) Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi penjelasan dan implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah beserta turunannya. Pada bagian lain juga dipaparkan profil potensi sumber daya alam dan sebaran penduduk pada 56 Kabupaten/Kota di Kalimantan. Data profil daerah diperoleh dari laman resmi Provinsi di Kalimantan, dan arsip data penelitian yang diperoleh laman Kemenkeu. Data profil daerah diolah secara deskriptif menggunakan Excel sementara data arsip penelitian dianalisis menggunakan SPSS.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Johan Arifin S.E., M.si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Muammar Nur Kholid, S.E., M.Ak., Akt. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran dengan penuh kesabaran hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak/Ibu Staf Pengajar dan Staf Akademik Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia;
6. Semua rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia; terimakasih atas bantuan, semangat dan inspirasi semuanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan mengingat keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna bagi sempurnanya penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga pembaca masih dapat memetik manfaat dari skripsi ini

Yogyakarta, Desember 2023

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	iv
Halaman Pengesahan Ujian.....	v
Berita Acara Ujian Tugas Akhir.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstrak.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel	11

2.1.1 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	13
2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	13
2.1.2.1 Tahap Perencanaan	13
2.1.2.2 Tahap Pelaksanaan	15
2.1.2.3 Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kerja.....	17
2.1.3 Pembiayaan dan Belanja Daerah.....	18
2.1.4 Pengertian Variabel.....	20
2.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.1.4.2 Transfer ke Daerah (TKD).....	22
2.1.4.3 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA).....	23
2.1.4.4 Kepadatan Penduduk.....	25
2.1.4.5 Belanja Modal.....	31
2.2 Telaah Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Hipotesis Penelitian.....	44
BAB III Metode Penelitian.....	47
3.1 Objek Kajian.....	48
3.2 Populasi.....	48
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	48
3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	48
3.3.2 Transfer ke Daerah (TKD).....	49
3.3.3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).....	50
3.3.4 Kepadatan Penduduk.....	51
3.3.5 Belanja Modal.....	51

3.4 Teknik Analisis Data.....	52
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.4.2 Metode Analisis Data.....	54
BAB IV Analisis Data dan Pembahasan.....	56
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	56
4.1.1 Komposisi APBD dan Belanja Modal.....	56
4.1.2 Profil Kepadatan Penduduk.....	65
4.2 Hasil Uji Regresi.....	69
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.2.2 Uji Hipotesis.....	69
4.2.3 Analisis Hasil.....	70
4.2.3.1 Analisis Realisasi Belanja Modal.....	70
4.2.3.2 Regresi Linear.....	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
DAFTAR REFERENSI.....	77
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

1.1 Luas wilayah dan populasi penduduk di Provinsi di Kalimantan.....	5
2.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalbar.....	27
2.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalteng.....	28
2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalsel.....	29
2.4 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kaltim.....	30
2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kaltara.....	31
2.6 Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan.....	40
3.1 Hubungan nilai koefisien dan kriteria untuk regresi linear berganda.....	54
4.1 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar.....	56
4.2 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng.....	57
4.3 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel.....	58
4.4 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim.....	59
4.5 Profil APBD dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara.....	60
4.6 Profil alokasi PAD, TKD, SiLPA dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalbar (rerata dari tahun 2016 hingga 2019).....	61
4.7 Profil alokasi APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalteng (rerata dari tahun 2016 hingga 2019).....	61
4.8 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kaltara (rerata dari tahun 2016 hingga 2019).....	62

4.9 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalsel (rerata dari tahun 2016 hingga 2019).....	63
4.10 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kaltim (rerata dari tahun 2016 hingga 2019).....	63
4.11 Klasifikasi perolehan PAD pada Kabupaten/Kota di Kalimantan.....	64
4.12 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalbar dalam rentang 2016-2019.....	66
4.13 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalteng dalam rentang 2016-2019.....	66
4.14 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalsel dalam rentang 2016-2019.....	67
4.15 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kaltim dalam rentang 2016-2019.....	68
4.16 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kaltara dalam rentang 2016-2019.....	68
4.17 Profil Realisasi belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta wilayah Provinsi-provinsi di Kalimantan.....	4
Gambar 1.2 Alur pikir rangkaian kegiatan penelitian.....	9
Gambar 2.1 Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.....	16
Gambar 2.2 Tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.....	18
Gambar 2.3 Konsep model penelitian.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi di Kalimantan

Lampiran 2: Profil Sumber-Sumber APBD dan Proporsi Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Kalimantan

Lampiran 3: Proporsi PAD, TKD, SiLPA dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di
Kalimantan

Lampiran 4: Uji Asumsi Klasik dengan Kolmogorov-Smirnov Test

Lampiran 5: Uji Hipotesis Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Lampiran 6: Nilai Signifikansi

Lampiran 7: Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Lampiran 8: Sebaran Residual di Sekitar Garis Normal P-P Plot

Lampiran 9: Sebaran Residual data di Sekitar Scatterplot

ABSTRACT

Regional Governments have the right to arrange APBD according to regional condition and needs as a form of regional autonomy implementation. This research aims to analyze the influence of PAD, TKD, SiLPA and population density on capital expenditure with the diversity and regional profiles in Kalimantan. The method used in this research is correlational deductive data on regional profiles from the official regional government website, and data archives in the form of APBD realization reports for 2016 to 2019 in 56 cities in Kalimantan from the official website of the Minister of Finance. Data analyse using SPSS. The result of this research shows that PAD regression coefficient is 43.9% and TKD is 48.3% which means has a sufficient effect on capital expenditure, while SiLPA and population density have no effect on capital expenditure.

Keywords: PAD, TKD, SiLPA, Population Density, Capital Expenditure

ABSTRAK

Pemerintah daerah berhak menyusun APBD sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya sebagai wujud implementasi otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, TKD, SiLPA, dan kepadatan penduduk terhadap belanja modal dengan keberagaman dan profil daerah di Kalimantan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif korelasional terhadap data profil daerah dari laman resmi pemerintah daerah, dan arsip data berupa laporan realisasi APBD tahun 2016 hingga 2019 pada 56 Kabupaten/Kota di Kalimantan dari laman resmi Kementerian Keuangan. Data dianalisis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi PAD sebesar 43,9% dan TKD sebesar 48,3% yang berarti berpengaruh cukup terhadap Belanja Modal, sementara SiLPA dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Otonomi Daerah, Kepadatan Penduduk, Laporan realisasi APBD, PAD, SiLPA, TKD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desentralisasi menurut Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Setiap daerah memiliki kewenangannya masing-masing untuk mengatur wilayahnya. Hal ini dinamakan dengan otonomi daerah yaitu setiap daerah memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengatur warganya sesuai dengan UU. Ginting (2017) mengatakan Pemerintah pusat memberikan kontrol kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya yaitu dengan otonomi daerah agar pembangunan tetap terlaksana. Pemerintah daerah juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyusun anggaran belanjanya atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya juga diawasi oleh pemerintah pusat. UU No. 23 Tahun 2014 pasal 32 menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda”. Tiga bagian penting dalam menyusun APBD yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Belanja Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Belanja daerah salah satunya digunakan untuk belanja modal. Belanja modal adalah suatu bentuk belanja untuk pembiayaan daerah yang sangat penting dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan anggaran belanja modal (Hardiningsih & Wakhidati, 2017). Menurut Nurhidayati & Yaya (2013) bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), DAK, dan DAU teruji berpengaruh terhadap belanja modal dalam pembiayaan pemerintah daerah. Sementara menurut Juniawan & Suryantini (2018) mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang memadai dengan anggaran belanja modal yang memadai pula. Disamping itu, belanja modal adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal ini diperuntukkan membeli aset tetap. Harapannya, pelayanan terhadap publik akan membaik seiring dengan bertambahnya penggunaan belanja modal untuk membeli aset demi kepentingan publik (Siswiyanti, 2015).

Terkadang APBD bisa mengalami surplus atau defisit, meskipun realisasinya lebih sering terjadi defisit. Inilah yang menjadi dasar pembiayaan daerah dimana surplus APBD akan diterima atau untuk menambah kekurangan jika terjadi defisit. Menurut Saputra & Darwanis (2014) PAD merupakan sumber pendapatan utama daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Semakin tinggi pengaruh PAD dalam APBD, berbanding terbalik dengan dependensi daerah akan bantuan dari pusat. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan

satu-satunya pendapatan daerah dimana pemerintah daerah memiliki kontrol penuh dalam pengelolaannya (Mamuka & Elim, 2014). TKD juga merupakan salah satu pendapatan daerah. TKD bersumber dari APBN dengan tujuan memperbaiki pelayanan untuk masyarakat serta menjadi salah satu bentuk dari tanggungjawab atas pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah pusat. Dana perimbangan juga memiliki peran penting dan biasanya menjadi pembiayaan pemerintah daerah paling besar (Wati, 2017). Dalam UU No. 1 Tahun 2022, TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa”.

Ginting (2017) menyatakan seringkali terdapat kelebihan pada anggaran dalam satu periode meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan, namun kelebihan itu dapat dimanfaatkan untuk alokasi belanja modal. Kelebihan ini, dinamakan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA tahun sebelumnya juga menjadi sumber pendapatan (Hardiningsih & Wakhidati, 2017). SiLPA yang ideal merupakan salah satu dasar penilaian bagi program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. SiLPA kebanyakan digunakan untuk belanja modal.

Seperti yang tertuang pada UU No. 33 Tahun 2004, luas wilayah menggambarkan kebutuhan akan tersedianya sarana dan prasarana untuk setiap satuan wilayah. Luas wilayah berpengaruh karena belanja modal lebih condong kepada pembangunan fisik di suatu wilayah, dan luas wilayah ini menjadi ukuran apakah ukuran suatu wilayah mempengaruhi jumlah belanja modal pemerintah daerah setempat (Ardhini, 2011). Daerah yang luas wilayahnya

lebih besar tentunya membutuhkan infrastruktur untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi. Pulau Kalimantan (tidak termasuk Malaysia dan Brunei) yang luasnya sekitar 544 ribu km² terdiri atas lima Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota. Peta wilayah provinsi di Kalimantan disajikan pada gambar 1.1 dan sebaran penduduk di pulau Kalimantan ditunjukkan pada tabel 1.1. Sementara itu, pulau Jawa yang luasnya sekitar seperempat pulau Kalimantan terdiri atas enam Provinsi dan 119 Kabupaten/Kota.



Gambar 1.1
Peta wilayah Provinsi-provinsi di Kalimantan
(Sumber: <https://peta-hd.com/peta-provinsi-di-pulau-kalimantan/>)

Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa luas wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan lebih besar dibanding luas kabupaten/Kota di pulau Jawa. Namun sebaliknya dengan jumlah penduduk. Berdasarkan sensus penduduk

tahun 2020, lima Provinsi di pulau Kalimantan dihuni sekitar 16,6 juta, sementara di pulau Jawa sekitar 151,6 juta jiwa. Dengan demikian, tingkat kepadatan di pulau Kalimantan sekitar 30 jiwa/km² sementara di pulau Jawa sekitar 1.092 jiwa/km² (atau lebih dari 36 kali).

Tabel 1.1 Luas wilayah dan populasi penduduk di Provinsi di Kalimantan

Provinsi	Ibukota	Luas (km ²)	Populasi (sensus thn 2000)	Populasi (sensus thn 2010)	Populasi (sensus thn 2020)
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307	4.016.353	4.397.162	5.414.390
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.565	1.801.965	2.181.002	2.670.000
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744	2.984.026	3.589.731	4.087.894
Kalimantan Timur	Samarinda	129.066	2.451.895	3.536.503	3.793.152
Kalimantan Utara	Tanjung Selor	75.468	-	-	625.796
Jumlah		544.149	11.254.239	13.704.398	16.591.232

Sumber data: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>

Menurut Direktorat Otonomi Daerah, realitas yang terjadi pada pemerintah daerah adalah belanja langsung lebih rendah dari belanja tidak langsung yang menunjukkan lemahnya kualitas belanja daerah serta APBD. Sri Mulyani mengatakan bahwa penggunaan anggaran pemerintah daerah sebanyak 70% untuk keperluan operasional, dan hanya 30% yang digunakan untuk masyarakat (BPKD Rejang Lebong, 2019). Sebagai contoh, menurut laporan realisasi APBD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019, belanja barang dan jasa bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja modal.

Presiden Jokowi dalam pidatonya dalam Sidang Paripurna DPR mengatakan bahwa belanja negara pada tahun 2019 akan difokuskan salah satunya untuk menguatkan desentralisasi fiskal (Aji Pitoko, 2018). Hasil penelitian Nurhidayati & Yaya (2013) menunjukkan bahwa proporsi belanja modal pemerintah daerah di Kalimantan sebagian besar antara 20% hingga 30%, sedangkan pada daerah di Jawa dan Sulawesi antara 10% hingga 20% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

PAD, TKD, SiLPA dan belanja modal adalah bagian dari APBD. APBD merupakan realisasi dari teori keagenan pada sektor publik dimana masyarakat menjadi prinsipal dan pemerintah menjadi agen. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari variabel-variabel tersebut yang hasilnya dapat menjadi pertimbangan apakah pemerintah sebagai agen sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat. Kebaruan pada penelitian ini yaitu pada variabelnya yang menggabungkan PAD, TKD, SiLPA dan kepadatan penduduk, populasi pada wilayah Kalimantan, serta pada periode tahun 2016 hingga tahun 2019

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi seperti tertera pada bagian A di atas menunjukkan bahwa PAD dapat digunakan untuk meningkatkan anggaran belanja modal. SiLPA, DAU dan DAK terbukti berpengaruh terhadap belanja modal dalam pembiayaan pemerintah daerah. TKD memiliki peran penting dan biasanya menjadi pembiayaan pemerintah daerah paling besar. Daerah yang luas wilayahnya lebih besar dan tentunya membutuhkan infrastruktur untuk melayani masyarakat lebih banyak lagi. Namun, Kalimantan yang luas

daerahnya lebih besar memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dari pulau Jawa. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang daerahnya luas, PAD besar karena sumber daya alam yang besar, namun jumlah penduduk relatif sedikit. Sebagai contoh, Kabupaten Kutai Kartanegara luas wilayah 25.988 km² dan jumlah penduduk 692.776 jiwa telah memperoleh PAD sekitar Rp. 303,9 M pada tahun 2018. Terdapat pula beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan yang wilayahnya kecil, PAD rendah karena minim sumber daya alam, seperti Kabupaten Batola dengan luas wilayah 2999,64 km² dan jumlah penduduk sekitar 310 ribu jiwa memiliki PAD sekitar Rp. 105,2 M pada tahun yang sama.

Adanya kenyataan ini tentu saja membuat keberagaman komposisi atau pola pendapatan dan belanja daerah, termasuk belanja modal, dan kepadatan penduduk suatu daerah dengan daerah lain. Adanya keberagaman seperti yang telah tersaji dalam komposisi APBD ini menjadi perhatian penulis. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah mengenai:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah TKD berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap belanja modal?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada:

1. pemerintah daerah yang dipilih adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berada di lima Provinsi di Kalimantan (secara keseluruhan terdapat 56 Kota dan Kabupaten);
2. data yang diolah berupa data sekunder APBD Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut di atas dari tahun 2016 hingga 2019 dari sumber resmi pemerintah., tahun 2020 tidak disertakan karena sedang terjadi pandemi covid-19.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

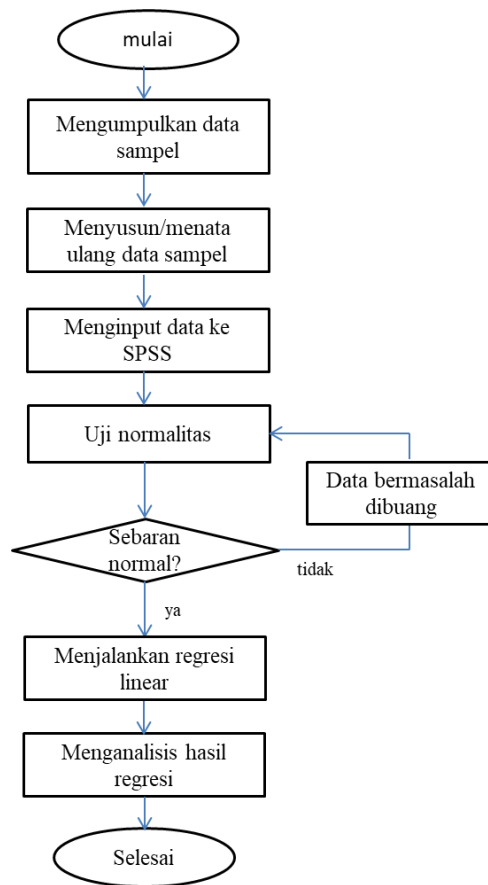
1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja modal
2. Menganalisis pengaruh TKD terhadap belanja modal
3. Menganalisis pengaruh SiLPA terhadap belanja modal
4. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk terhadap belanja modal

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap memberi manfaat terhadap banyak kalangan, antara lain:

1. Sebagai gambaran struktur pembiayaan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu daerah;
2. Bahan pertimbangan pihak terkait dalam penyusunan anggaran pada tahun mendatang;

1.6 Sistematika Pembahasan



Gambar 1.2 Alur pikir rangkaian kegiatan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Perencanaan pembangunan daerah memiliki tahapan perencanaan perencanaan mulai Perencanaan Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) hingga Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Tahap pertama perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Menurut UU Nomor 17 Tahun 2007 “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun”. Setelah RPJDP selesai, dibuatlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dasar RPJDP. Kemudian, setelah RPJMD terbentuk, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi penjabaran RPJMD dalam jangka waktu setahun.

Perencanaan dan penganggaran daerah adalah tanda dari efektifnya pengelolaan keuangan daerah dimana hal ini berdampak pada desentralisasi fiskal. Kepala daerah membuat rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian rancangan tersebut dibahas oleh kepala daerah bersama dengan DPRD dan disetujui menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Tahapan berikutnya, kepala daerah menyampaikan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan dibahas oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah mengeluarkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD bagi kepala SKPD untuk menyusun RKA-SKPD. Tahapan terakhir adalah membuat peraturan daerah.

2.1 Landasan Teori dan Pengertian Variabel

Implementasi dari otonomi daerah adalah desentralisasi berupa kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Alasan pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat ialah karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat serta dapat mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah di daerahnya (Karunia, 2020). Desentralisasi berarti merapatkan pemerintah dengan masyarakatnya (Simanjuntak, 2015). APBD menjadi realisasi dari desentralisasi tersebut. Pemerintah daerah berhak menyusun APBD sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya. Penyusunan APBD ini merupakan bentuk diterapkannya teori agensi, yaitu hubungan antara masyarakat dengan DPRD dimana masyarakat sebagai prinsipal dan DPRD sebagai agen. Sedangkan hubungan DPRD dengan pemerintah adalah DPRD sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Salah satu masalah keagenan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu *budget slack*.

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak satu orang atau lebih sebagai prinsipal dan menyertakan orang lain sebagai agen untuk memberikan pelayanan dan mengambil keputusan. Dalam beberapa situasi, agen dibayar oleh prinsipal untuk mengeluarkan sumberdaya (biaya ikatan) dan menjamin agen tidak akan bertindak yang kelak akan merugikan prinsipal atau prinsipal mendapatkan kompensasi jika agen melakukan tindakan tersebut.

Menurut (KNKG, 2022) Teori ini melihat sebuah organisasi sebagai ikatan yang menunjukkan bahwa prinsipal dan agen semestinya memiliki

kontrak yang secara jelas menunjukkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu agen melakukan hal yang menguntungkan bagi prinsipal dalam mengelola kekayaan prinsipal. Masalah keagenan dalam pemerintahan tidak berbeda dengan yang terjadi di organisasi bisnis, yaitu ketika terjadinya kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Pemerintah dilihat dari teori keagenan yang memperlihatkan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen disini adalah eksekutif dan legislatif yang diberikan tanggung jawab oleh rakyat dengan cara dipilih dan rakyat adalah prinsipal yang memberi amanat.

Halim & Abdullah (2006) menjelaskan teori agensi yang berkaitan dengan hubungan legislatif eksekutif. Hubungan itu berbentuk vertikal yaitu prinsipal sebagai pemimpin dan agen sebagai yang dipimpin dalam suatu organisasi. Pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Sejalan dengan teori menurut Jensen dan Meckling, pemerintah pusat mempercayakan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dengan adanya desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kuasa untuk menangani pemerintahannya sendiri seperti pada asas otonomi daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2.1.1 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2014, “Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Pendapatan daerah terdiri dari semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu hak daerah dalam satu periode yang tidak perlu dibayarkan kembali dan menambah ekuitas dana lancar. Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 “Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah”. Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang merupakan ekuitas dana, adalah hak daerah dalam satu periode tidak perlu dibayarkan kembali.

2.1.2 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Siklus pengelolaan keuangan daerah memiliki tahapan-tahapan yang menjadi tugas pemerintah daerah agar terpenuhinya prinsip ekonomi, efektivitas, efisiensi, akuntabel serta transparan (Mahmudi, 2006). Menurut Bimtek Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah (BPPPKD), siklus ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan evaluasi kerja seperti dijelaskan berikut ini.

2.1.2.1 Tahap Perencanaan

Tahapan ini sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil dari pengelolaan keuangan daerah. Tahapan ini

dibagi menjadi tiga bagian yaitu menentukan input, proses serta output. Input dalam proses ini yaitu berupa dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD),
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja),
6. Kebijakan Umum APBD (KUA), dan
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen perencanaan daerah dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu (a) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan (b) Dokumen perencanaan keuangan daerah yaitu Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, dan RAPBD. APBD merupakan *blueprint* dan tulang punggung pembangunan bagi pemerintah daerah, maka dari itu RAPBD menjadi gambaran pembangunan daerah. Hal ini yang mendasari RAPBD menjadi *output* untuk tahapan perencanaan ini. Sebelum RAPBD dibuat, langkah pertama yang dilakukan adalah merencanakan anggaran. Setelah itu, mengisi formulir Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh setiap satuan kerja yang berada di pemerintah daerah yang kemudian akan direkapitulasi hingga menjadi RAPBD SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan menilai RAPBD SKPD, dan kumpulan dari seluruh RKA-SKPD akan menjadi RAPBD yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi APBD.

2.1.2.2 Tahap Pelaksanaan

Output pada tahap perencanaan yaitu APBD yang disetujui oleh DPR pada tahap perencanaan akan menjadi *input* dalam tahapan ini. Pada tahapan pelaksanaan atau implementasi ini terdapat proses yang dinamakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Melalui sistem inilah *output* pada tahapan ini dihasilkan yaitu laporan pelaksanaan anggaran.

Seluruh SKPD yang diinstruksikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk membuat dan kemudian menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) maksimal 3 hari kerja setelah APBD diputuskan. Rancangan itu berisi perincian sasaran yang ingin diraih, kegiatan, program, fungsi, anggaran yang diberikan, dan rencana pengambilan dana serta perkiraan pendapatan. Setelah itu, kepala SKPD memberikan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD. Rancangan kemudian diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah, setelah rancangan disahkan akan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala

satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK maksimal 7 hari kerja setelah disahkan.

APBD dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 “APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan”. Setelah 6 (enam) bulan, pemerintah daerah akan membuat laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya, yang kemudian disampaikan kepada DPRD paling lambat bulan Juli. Selanjutnya pemerintah daerah akan membahasnya bersama dengan DPRD untuk menyusun prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Mekanisme keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah disajikan seperti dalam gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5750>

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjelaskan mengenai ruang lingkup keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain, penerimaan Daerah, pengeluaran Daerah, kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

2.1.2.3 Tahap Pelaporan dan Evaluasi Kerja

Output dari tahapan kedua adalah laporan pelaksanaan anggaran yang mana akan menjadi *input* dalam tahapan ini, seperti ditunjukkan pada gambar 2.2. Laporan pelaksanaan anggaran akan ditindaklanjuti dan dihasilkannya laporan keuangan yang siap untuk diterbitkan. Jika sudah sesuai dengan standar yang berlaku, laporan selanjutnya diaudit dan disampaikan kepada DPRD serta diterbitkan. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja serta memberi *feedback* bagi perencanaan pada periode berikutnya.



Gambar 2.2 Tahapan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah

Sumber: <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/1.-Tulisan-Hukum-Wewenang-Keuda-Revisi-infokum.pdf>

2.1.3 Pembiayaan dan Belanja Daerah

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, belanja daerah dan pembiayaan daerah termasuk dalam pengeluaran daerah. Belanja daerah merupakan estimasi beban pengeluaran daerah yang dibagi dengan adil agar seluruh rakyat dapat merasakan manfaatnya, terutama dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020:

“Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan

penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.”

Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja daerah menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.1.4 Pengertian Variabel

2.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah pasti mempunyai sumber daya tersendiri yang akan digunakan sebagai pendapatan (*income*) untuk menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian daerah tersebut. *Income* ini dalam istilah lain disebut sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD) yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. PAD menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yang diambil sesuai dengan UU. Berdasarkan UU tersebut, PAD juga merupakan bentuk desentralisasi karena memberikan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerahnya sesuai dengan kemampuan pada daerah tersebut. Sumber PAD menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah adalah partisipasi wajib untuk daerah yang dikenakan kepada individu atau badan sesuai dengan undang-undang yang digunakan untuk kepentingan daerah. Pajak ini diperoleh dari pajak hotel, restoran dan rumah makan, hiburan, reklame, penerangan jalan, bahan galian golongan C, dan pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. Retribusi daerah adalah pajak sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu

yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ini dapat berupa retribusi jasa umum, jasa usaha, atau perizinan tertentu.

Selain itu, PAD juga bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Sumber pendapatan dari bagian ini bisa berupa bagian laba BUMD, bagian laba lembaga keuangan bank, atau bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

Seperti yang tertulis dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir
6. pendapatan bunga
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2 Transfer ke Daerah (TKD)

Menurut UU No. 28 Tahun 2022:

“Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”

Tujuan dari TKD yakni untuk meminimalisir ketimpangan fiskal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Komponen TKD terdiri atas DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari APBN yang diberikan untuk daerah dengan presentase yang sudah ditentukan, berasal dari pajak dan SDA yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan berdasarkan

celah fiskal dan alokasi dasar pada suatu daerah agar kekuatan keuangan antar-daerah merata. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ketika ada kegiatan khusus daerah yang memerlukan pendanaan. Besar DAK ditetapkan di dalam APBN setiap tahunnya.

UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan

“...Daerah yang akan menerima DAK wajib menyediakan dana penyesuaian minimal 10% dari DAK yang diberikan kepada daerah tersebut, dan dana penyesuaian ini harus dimasukkan ke dalam APBD”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2002 dalam pasal (1) ayat 17:

“Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus”.

Dana keistimewaan dalam pasal (1) ayat 19:

“Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU”.

Dana desa dalam pasal (1) ayat 20:

“Dana Desa diperuntukkan untuk desa yang bertujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.”

2.1.4.3 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA)

UU No. 28 Tahun 2022 mendefinisikan SiLPA:

“Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan”.

SiLPA menjadi sumber pembiayaan jika terjadi defisit. SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit dan menyelesaikan

kewajian jika belanja lebih besar dari penerimaan tahun berjalan ialah SiLPA dari tahun sebelumnya. Ginting, (2017) berpendapat bahwa SiLPA merupakan indikator keefisienan pengeluaran pemerintah, sebab SiLPA hanya akan tercipta jika pengeluaran lebih kecil dibanding pemasukkan atau surplus. Banyak pemerintah daerah yang masih menyatakan SiLPA sebagai PAD dikarenakan pengertian SiLPA ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam periode berjalan yang bisa digunakan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran,
- b. membiayai kewajiban pemerintah daerah yang belum memiliki anggaran,
- c. membayar bunga dan pokok utang atau obligasi daerah yang melewati anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD,
- d. membayar bunga dan pokok utang, membiayai kenaikan gaji dan tunjangan ASN karena peraturan pemerintah,
- e. membiayai yang belum memiliki anggaran,
- f. serta membiayai kegiatan untuk capaian Sasaran Kinerja ditambah dari yang sudah ditentukan dalam DPA SKPD periode berjalan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran periode berjalan.

2.1.4.4 Kepadatan Penduduk

Menurut UU No. 24 Tahun 2013, “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Jumlah penduduk pada suatu Kabupaten atau Kota di Indonesia sangat bervariasi. Kabupaten atau Kota di Pulau Jawa dan Bali jauh lebih banyak dibanding di Kalimantan dan Sumatera jika dibandingkan dengan di Papua. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah hampir sama dengan provinsi Jawa Barat namun dihuni sekitar 417 ribu penduduk. Demikian juga dengan Kabupaten Malinau yang dihuni sekitar 77 ribu penduduk, dibanding penduduk di Provinsi Jawa Barat sekitar sekitar 49,9 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan jumlah sarana publik (Samudra & Handayani, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan wilayah sebagai “daerah kekuasaan; lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kota); lingkungan kerja pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan di daerah.” Daerah otonom mempunyai batas wilayah dan wewenang dalam mengatur pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Luas Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di Indonesia relatif bervariasi. Luas wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota di pulau Jawa relatif kecil dibanding Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Sebagai contoh, luas provinsi Jawa Barat sekitar sekitar 35

ribu km² ternyata hampir sama dengan luas Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur, bahkan lebih kecil dibanding Kabupaten Malinau di Kalimantan Utara.

Penduduk merupakan unsur penting dalam sebuah pemerintahan, karena itu pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk dengan memberikan fasilitas yang memadai. Alokasi belanja modal semestinya dimanfaatkan untuk membangun dan menunjang fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan para penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai aset modal dasar yang mampu meningkatkan kualitas, keahlian, keterampilan dan produksi nasional. Di sisi lain, jumlah penduduk yang besar bisa juga dipandang beban pembangunan karena membutuhkan pemenuhan struktur, sebaran, ataupun layanan sosial, apalagi jika kurang produktif yang hanya akan menjadi tanggungan bagi penduduk yang bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kepadatan penduduk suatu daerah menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah daerah tersebut. Besarnya kepadatan penduduk menyatakan seberapa banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berikut ini informasi geografis dan sebaran kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan, yang penulis peroleh dari masing-masing BPS provinsi di Kalimantan.

1) Kalimantan Barat (Kalbar)

Luas wilayah Kalbar sekitar 7,53% dari luas wilayah Indonesia, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 37 jiwa/km². Provinsi Kalbar terdiri atas 12 Kabupaten dan 2 Kota. Tabel 2.1 berikut menggambarkan kepadatan pendudukan pada beberapa tahun terakhir, dan lampiran tabel 2.1 berisi data dan informasi geografis kabupaten/Kota di Kalbar.

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalbar

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sambas	82,3	82,3	83,0	84,0	94,0
Bengkayang	45,0	45,0	46,0	47,0	56,0
Landak	36,6	36,6	37,0	38,0	45,0
Mempawah	199,8	199,8	202,0	207,0	108,0
Sanggau	35,1	35,1	36,0	37,0	38,0
Ketapang	15,5	15,5	16,0	16,0	18,0
Sintang	18,6	18,6	19,0	19,0	19,0
Kapuas Hulu	8,4	8,4	9,0	9,0	8,0
Sekadau	35,9	35,9	36,0	37,0	39,0
Melawi	18,7	18,7	19,0	20,0	21,0
Kayong Utara	23,5	23,5	24,0	25,0	28,0
Kubu Raya	79,4	79,4	81,0	83,0	88,0
Kota Pontianak	5727,2	5727,9	5817	5999	6110
Kota Singkawang	419,7	419,7	427,0	442,0	466,0
Kalimantan Barat	33,0	33,0	34,0	35,0	37,0

(Sumber: kalbar.bps.go.id)

2) Kalimantan Tengah (Kalteng)

Tingkat kepadatan penduduk Kalteng sekitar 17 jiwa/km².

Sebaran pendudukan perkiraan pada tahun 2017 di Kabupaten/Kota di Kalteng ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini, dan informasi geografisnya disajikan pada lampiran tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalteng

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	17	17	17	18
Kotawaringin Barat	27	27	28	29
Kotawaringin Timur	26	27	27	28
Kapuas	23	24	24	24
Barito Selatan	15	15	15	15
Barito Utara	15	16	16	16
Sukamara	15	16	16	17
Lamandau	12	12	13	13
Seruyan	11	12	12	13
Katingan	9	9	10	10
Pulang Pisau	14	14	14	14
Gunung Mas	10	11	11	11
Barito Timur	31	31	32	33
Murung Raya	5	5	5	5
Palangka Raya	112	115	118	122
Kalimantan Tengah	17	17	17	18

(Sumber: kalteng.bps.go.id)

3) Kalimantan Selatan (Kalsel)

Provinsi Kalsel dengan luas wilayah sekitar 38,744 km² terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota. Menurut BPS Kalsel diperkirakan pada tahun 2017 lalu jumlah penduduk Kalsel sekitar 3,9 juta lebih, yang berarti tingkat kepadatan penduduk sekitar 102 jiwa/km². Berdasarkan sensus pada tahun 2020, jumlah penduduk Kalsel bertambah menjadi sekitar 4.087.900. Sebaran kepadatan pendudukan di Kabupaten/Kota di Kalsel ditunjukkan pada tabel 2.3 dan informasi geografis disajikan pada lampiran tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalsel

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
	2016	2017	2018	2019
Tanah Laut	90,7	92,1	93,4	94,7
Kotabaru	34,4	34,9	35,5	36,1
Banjar	120,6	122,4	124,3	126,0
Barito Kuala	100,9	102,2	103,5	104,7
Tapin	68,3	69,1	70,0	70,9
Hulu Sungai Selatan	127,4	128,9	130,3	131,7
Hulu Sungai Tengah	178,9	181,0	183,0	185,1
Hulu Sungai Utara	256,0	259,4	262,8	266,1
Tabalong	64,6	65,6	66,6	67,5
Tanah Bumbu	66,8	68,5	70,2	71,9
Balangan	66,8	67,9	68,9	70,0
Banjarmasin	9502,5	9622,1	9734,3	9841,8
Banjarbaru	650,6	669,6	688,9	708,1

Kalimantan Selatan	104,7	106,3	108,0	109,5
--------------------	-------	-------	-------	-------

(Sumber: kalsel.bps.go.id)

4) Kalimantan Timur (Kaltim)

Provinsi Kaltim yang terdiri atas 10 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah yang cukup besar. Jumlah penduduk di Provinsi ini pada tahun 2017 lalu berkisar 3,47 juta jiwa, dan dari sensus 2020 lalu bertambah menjadi lebih dari 3,79 juta jiwa. Diperkirakan tingkat kepadatan penduduk Kaltim saat ini sekitar 28,07 jiwa/km². Sebaran luas wilayah dan perkiraan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Kaltim pada tahun 2017 disajikan pada lampiran tabel 2.4, sementara sebaran kepadatan penduduk di Kaltim pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kaltim

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
	2016	2017	2018	2019
Paser	24,2	24,7	25,2	25,8
Kutai Barat	10,7	10,7	10,8	10,8
Kutai Kartanegara	28,3	28,9	29,6	30,3
Kutai Timur	10,7	11,2	11,7	12,1
Berau	9,9	10,2	10,4	10,7
Penajam Paser Utara	53,4	53,9	54,5	55,0
Mahakam Ulu	1,3	1,4	1,4	1,4
Balikpapan	1222,0	1241,6	1260,6	1279,0
Samarinda	1156,0	1177,1	1197,6	1218,1
Bontang	1022,9	1045,8	1067,8	1089,4

Kalimantan Timur	27,5	28,1	28,7	29,2
------------------	------	------	------	------

(Sumber: kaltim.bps.go.id)

5) Kalimantan Utara (Kaltara)

Kaltara terdiri atas empat Kabupaten dan satu Kota dengan luas wilayah sekitar 75.468 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sekitar 626 ribu jiwa. Informasi geografis Kaltara disajikan pada lampiran 2.5 sementara informasi kepadatan penduduk di Kaltara ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kaltara

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
	2016	2017	2018	2019
Malinau	0,1	0,1	2,0	2,0
Bulungan	0,4	0,4	10,0	10,0
Tana Tidung	5,1	5,2	6,0	6,0
Nunukan	0,6	0,6	15,0	15,0
Tarakan	1005,6	1008,9	1045,0	1080,0
Kalimantan Utara	9,1	9,2	9,4	10,0

(Sumber: kaltara.bps.go.id)

2.1.4.5 Belanja Modal

Definisi belanja modal menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 pasal 56 yaitu “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu (1) periode akuntansi”.Belanja modal dapat berupa pembelian aset ataupun memaksimalkan aset yang sudah ada (Samudra & Handayani, 2020). Pembelian aset seperti membeli mesin, tanah dan bangunan, membuat jalan dan aset tetap lainnya. Sedangkan memaksimalkan aset dengan cara memperbaiki sektor yang diperlukan oleh masyarakat seperti sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan. Jenis-jenis belanja modal tertulis pada pasal 65 yaitu Belanja modal meliputi:

- 1) belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung atau bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai untuk dipakai dalam kegiatan

operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) belanja jalan, irigasi, jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dan dalam siap dipakai;

5) Belanja aset tetap lainnya, yaitu pengeluaran untuk kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan atau pembangunan aset yang lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nuarisa (2013) berpendapat belanja modal berdasarkan kebutuhan daerah dikelompokkan dalam dua jenis belanja seperti berikut ini.

1) Belanja untuk fasilitas publik, yaitu belanja yang kegunaannya dirasakan masyarakat secara langsung. Belanja ini merupakan belanja modal bentuk fisik yang memiliki nilai ekonomis lebih dari setahun dan mengakibatkan bertambahnya aset daerah. Contohnya adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan jalan raya.

2) Belanja untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, yaitu belanja yang kegunaannya tidak dirasakan masyarakat secara langsung melainkan dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja ini mengakibatkan bertambahnya asset tetap. Contohnya adalah kendaraan dinas, gedung pemerintahan dan rumah dinas.

Belanja modal berpengaruh terhadap laju ekonomi karena merupakan salah satu dasar untuk menghitung PDB. Alokasi belanja modal dialokasikan diharapkan agar terjadinya *multiplier-effect* bagi daerah. Syarat utama pemberian pelayanan publik oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap sebagai akibat dari adanya belanja modal. Belanja modal merupakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan dengan teratur, sesuai dengan undang-undang, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta bermanfaat bagi masyarakat.

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2013 Nurhidayati melakukan penelitian mengenai Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengetahui alokasi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan apa saja faktor yang mempengaruhi proporsi alokasi tersebut. Data dari penelitian ini diambil dari sampel sebanyak 142 pemda dari 23 kota dan 119 kabupaten. Program realisasi anggaran pemerintah daerah pada tahun 2010 hingga 2012 di analisis regresi linier berganda. Hasilnya Dana Alokasi Khusus dan efektifitas anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal. Proporsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah kota berada terdapat kesamaan dikisaran 10%-30%, sementara belanja pemerintah kabupaten terdapat perbedaan.

Darwanis dan Ryanda melakukan penelitian pada 2014 berjudul Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Aceh. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh *Capital Expenditure* terhadap pendapatan asli serta dampaknya pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sumber data diambil dari realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah kota dan kabupaten tahun 2009 hingga 2012 pada Provinsi Aceh. Hasilnya, belanja modal secara negatif berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara positif tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan belanja modal dengan

kinerja pendapatan keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap PAD, sedangkan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sementara itu modal pengeluaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Siswiyanti tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Sumber data dari penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran dan PBD yang dianalisis dengan metode analisis jalur. Hasil dari analisis ini menyatakan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal dapat digunakan sebagai penghubung antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2017, Wati dan Catur melakukan penelitian deskriptif verifikatif mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung dengan menggunakan metode survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi APBD tahun anggaran 2004 hingga 2015 yang didapat dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu PAD memiliki hubungan sangat kuat dengan belanja daerah begitu juga dengan hubungan antara dana perimbangan dengan belanja daerah. Pada tahun yang sama, Rahmi Ginting meneliti tentang pengaruh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah terhadap belanja modal pada pemerintah

kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sumber data penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2011 sampai 2015. Data diolah menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji f dan uji koefisien determinasi. Hasilnya menunjukkan bahwa DAU, PAD dan luas wilayah memengaruhi belanja modal, sedangkan SiLPA tidak memengaruhi belanja modal.

Juniawan dan Ni Putu dalam penelitiannya pada tahun 2018 bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. Data diambil dari seluruh kota dan kabupaten di Bali dengan menggunakan metode sampling jenuh. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali yang diteliti oleh Putra dan Made pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber dari data sekunder yaitu observasi non partisipan tahun 2010 sampai 2016. Data dianalisis menggunakan metode analisis jalur. Hasilnya yaitu PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap belanja modal; PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara dana perimbangan berpengaruh secara langsung namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; PAD dan dana

perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal.

Pada 2019, Priatna dan Jaya meneliti mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda, dengan uji t dan uji F. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Publikasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dengan sampel dari tahun 2007 hingga 2016. Berdasarkan analisis deskriptif hasilnya yaitu PAD, dana perimbangan, dan belanja modal cenderung tidak stabil selama 2007 hingga 2016. Uji hipotesis menunjukkan bahwa PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Koefisien determinasi sebesar 73,6%, variabel lain sebesar 26,4% merupakan variabel yang tidak diteliti namun berpengaruh terhadap belanja modal yaitu regulasi, kebijakan infrastruktur, inflasi dan lain lain. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nurul pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal dengan PAD, DAU dan DAK sebagai variabel intervening. Studi kasus dilakukan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji t, analisis jalur dan uji sobel test. Hasilnya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan PAD sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap

alokasi belanja modal dengan DAU sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan DAK sebagai variabel intervening.

Angelina dkk melakukan penelitian pada 2020 yang bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan SiLPA terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan sampel dari 33 Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasilnya adalah PAD, DAU dan SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal secara parsial, sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal secara parsial. Namun secara simultan, PAD, DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal. Masih pada tahun 2020, Fajar Maulana dan Wida Fadhlia melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh PAD, DAK dan luas wilayah terhadap belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sumber data yaitu LRA Provinsi Aceh tahun 2014 hingga 2018 yang dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasilnya adalah PAD, DAK, dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal berdasarkan uji F secara simultan, sedangkan secara parsial PAD, DAK, dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini penulis.

Tabel 2.6 Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan

Sumber	Objek Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nurhidayati & Yaya (2013) Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. <i>Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia</i>	Kabupaten/Kota yang telah menyusun laporan realisasi anggaran tahun 2010-2012	Variabel dependen: proporsi belanja modal Variabel independen: kemandirian daerah, efektifitas keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, SiLPA, DAU, DAK	Pengumpulan data menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan dianalisis dengan metode regresi berganda linier.	DAK dan efektifitas anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap proporsi belanja modal. Proporsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah kota berada terdapat kesamaan dikisaran 10%-30%, sementara belanja pemerintah kabupaten terdapat perbedaan.
Saputra & Darwanis, 2014 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah)	realisasi Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah kota dan kabupaten tahun 2009 hingga 2012 pada Provinsi Aceh	Variabel dependen: kinerja keuangan Variabel independen: belanja modal Variabel intervening: PAD	metode <i>path analysis</i> (analisis jalur)	belanja modal secara negatif berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara positif tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan

<p>Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). <i>Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis</i></p>	<p>belanja modal dengan kinerja pendapatan keuangan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap PAD, dan PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan modal pengeluaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja keuangan, namun berpengaruh secara tidak langsung melalui PAD</p>			
<p>Siswiyanti, 2015 Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.</p>	<p>Laporan Realisasi APBD tahun 2012- 2014 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Variabel dependen: pertumbuhan ekonomi Variabel independen: PAD, DAU dan DAK Variabel mediasi: belanja modal</p>	<p>Metode kuantitatif.</p>	<p>PAD dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta belanja modal</p>

				dapat digunakan sebagai penghubung antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.
Wati, 2017 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. <i>Jurnal Kajian Akuntansi</i>	Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bandung tahun 2004-2015	Variabel dependen: PAD, dana perimbangan Variabel independen: belanja daerah	Metode survey dan penelitian deskriptif verifikatif	PAD memiliki hubungan sangat kuat dengan belanja daerah begitu juga dengan hubungan antara dana perimbangan dengan belanja daerah.
Sari & Ningsih, 2019. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK Sebagai Variabel Intervening. <i>Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi</i>	11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Variabel dependen: jumlah penduduk Variabel independen: belanja modal Variabel intervening: PAD, DAU, DAK	Metode dokumentasi untuk pengumpulan data. Analisis deata dengan statistik deskriptif, analisis regresi sederhana, uji t, analisis jalur dan uji sobel test.	Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dengan PAD sebagai variabel intervening, jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan DAU sebagai variabel

				intervening, jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan DAK sebagai variabel intervening.
Widiasmara, 2019 Pengaruh PAD, DAK, dan DAU, Total Aset, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variabel Moderating Pprovinsi di Indonesia Tahun 2014-2016. <i>Journal of Islamic Finance and Accounting</i>	Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016	Variabel dependen: belanja modal Variabel independen: PAD, DAU, DAK, total aset dan luas wilayah Variabel moderasi: pertumbuhan ekonomi	Metode regresi linier berganda dengan model <i>quasi moderating</i> .	DAK dan total aset berpengaruh signifikan terhadap belanja modal; PAD, DAU dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal; pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan DAU dan total aset terhadap belanja modal.
Angelina et al., 2020. Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal. <i>Owner</i>	Laporan Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel dependen: belanja modal Variabel independen: pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan SiLPA	Pengumpulan data menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi	PAD, DAU dan SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal secara parsial, sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap

				belanja modal secara parsial. Namun secara simultan, PAD, DAU, SiLPA dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal
Maulana & Fadhlia, 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi</i>	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014 sampai 2018.	Variabel dependen: belanja modal Variabel independen: PAD, DAK dan luas wilayah	Regresi linier berganda	PAD, DAK dan luas wilayah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal berdasarkan uji F atau simultan, sedangkan secara parsial PAD, DAK dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

2.3 Hipotesis Penelitian

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa belanja modal digunakan untuk memenuhi fasilitas untuk pelayanan publik, tentu ini berkaitan erat dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Selain itu juga berkaitan dengan fasilitas dan aset yang sudah tersedia atau dimiliki saat ini. Dari uraian pada bagian sebelumnya dapat dirangkum bahwa penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini

(2018), Ginting (2017), Hardiningsih & Wakhidati (2017), Priatna & Purwadinata (2019) serta Angelina et al. (2020) menyatakan bahwa PAD berpengaruh dan berperan penting terhadap belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maesa dkk (2018) dan Priatna & Purwadinata (2019) menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal berdasarkan penelitian Angelina et al. (2020), namun berpengaruh terhadap belanja modal berdasarkan penelitian oleh Ginting (2017). Luas wilayah mempengaruhi belanja modal berdasarkan penelitian ini. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal berdasarkan penelitian Sari & Ningsih (2019).

Dari ringkasan teoritis dan beberapa telaah kajian dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor desentralisasi dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satunya untuk belanja modal suatu daerah untuk memenuhi hak-hak pelayanan oleh pemerintah daerah terhadap warganya. Untuk itu penulis mengajukan hipotesis berikut ini:

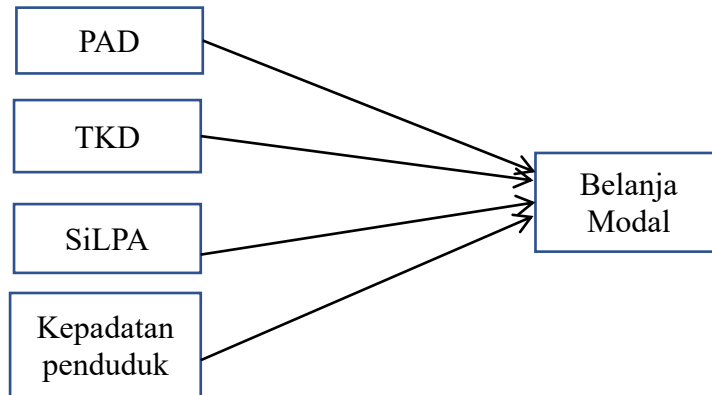
H1: PAD, tidak berpengaruh terhadap belanja modal

H2: TKD tidak berpengaruh terhadap belanja modal

H3: SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal

H4: Kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat disusun model konsep penelitian ini seperti ditunjukkan seperti diagram pada gambar 2.3 berikut.



Gambar 2.3 Konsep model penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian deduktif. Penelitian deduktif menurut Indriantoro & Supomo (2018) ialah penelitian untuk memeriksa hipotesis dengan cara mengkonfirmasi teori atau memeriksa aplikasi teori pada keadaan tertentu yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini adalah penelitian korelasional yaitu untuk menentukan adanya keterkaitan atau perkiraan berdasarkan korelasi antar variabel. Tipe penelitian seperti ini mengutamakan pada tingkat hubungan yang dipakai dalam melakukan perkiraan.

Berdasarkan jenis data, penelitian ini berupa penelitian arsip yaitu penelitian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Sumber dokumen berasal dari internal (dokumen, arsip, catatan asli dari suatu organisasi) ataupun eksternal (didapatkan dari pihak lain). Dengan demikian, data pada penelitian ini diperoleh dari data lapangan (data sekunder eksternal, dokumen yang dipublikasikan) berupa laporan APBD pada beberapa tahun seperti yang tertera dalam laman Kemenkeu. Laman resmi ini setiap saat dapat diakses oleh siapapun sehingga dengan mudah datanya disusun ulang untuk keperluan penulis.

3.1 Objek Kajian

Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD untuk tahun 2016-2019. Laporan ini diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Kementerian Keuangan pada laman <https://djpk.kemenkeu.go.id>

3.2 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara yang seluruhnya berjumlah 56 Kabupaten/Kota, seperti telah disebutkan pada tabel 2.1 hingga tabel 2.5.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain (Indriantoro & Supomo, 2018). Variabel independent pada penelitian ini adalah PAD, TKD, SiLPA dan kepadatan penduduk. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, belanja modal adalah sebagai variabel dependen.

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan daerah tersebut. PAD mencerminkan kemandirian dari suatu daerah dan bukti bahwa daerah tersebut dapat menjalankan desentralisasi fiskal. Diusahakan untuk meningkatkan PAD bersama dengan pelayanan publik (Nurhidayati & Yaya, 2013).

PAD = total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.2 Transfer ke Daerah (TKD)

TKD dibagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. DAU merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal. DAU berperan penting dalam beberapa daerah karena DAU lebih mendominasi dibandingkan dengan PAD (Nurhidayati & Yaya, 2013). DAU terdiri dari alokasi dasar dan celah fiskal, dengan

$$DAU = AD + CF$$

AD yaitu alokasi DAU berdasarkan alokasi dasar

CF yaitu alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal

Alokasi DAU untuk wilayah provinsi sebesar 90% dan untuk wilayah kabupaten/kota sebesar 10% dari DAU nasional. DAU nasional sendiri mendapatkan setidaknya 26% dari total pendapatan dalam negeri netto. DAK ialah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dengan tujuan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah yang akan menerima DAK wajib menyediakan dana penyesuaian paling sedikit 10% dari DAK yang diberikan kepada daerah tersebut, dan dana penyesuaian ini harus dimasukkan kedalam APBD. Besarnya DAK tergantung kepada kemampuan keuangan daerah itu sendiri dan ditentukan setiap tahun dalam APBN. DBH

adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan persentase tertentu. DBH bersumber dari pendapatan APBN yaitu dari pajak dan SDA. Alokasi DBH terdiri dari 3 jenis yaitu DBH PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), DBH BPHTB (Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan), dan DBH PPh WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri). Sebanyak 10% dari DBH PBB diberikan untuk pusat sedangkan 90% sisanya akan diberikan kepada daerah. Pada DBH BPHTB, pusat menerima 20% dan daerah menerima 80%. Sedangkan pada DBH PPh WPOPND berasal dari PPh sebesar 20%, 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten/kota.

Dana Keistimewaan adalah dana yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Terdapat 2 tahapan dalam penyaluran dana desa, tahap pertama yaitu transfer APBN dari RKUN ke RKUD serta tahapan transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

3.3.3 Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA)

Jika terdapat SiLPA dalam satu periode anggaran, maka pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pada periode itu. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 84, SiLPA menjadi sumber pembiayaan jika terjadi defisit. SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit dan menyelesaikan kewajiban jika belanja lebih

besar dari penerimaan tahun berjalan ialah SiLPA dari tahun sebelumnya.

3.3.4 Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, luas wilayah merupakan variabel yang merefleksikan kebutuhan sarana per satuan wilayah. Sholikhah & Wahyudin (2014) mengatakan semakin besar wilayah, maka semakin besar pula kebutuhan akan infrastruktur. Luas wilayah yaitu luas daerah. Menurut BPS, Penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi berencana menetap. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi dan juga jumlah sarana publik. Jumlah penduduk yaitu total jumlah penduduk pertahun dalam di daerah tersebut. Jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah disebut sebagai kepadatan penduduk. Data kepadatan penduduk di Indonesia diperoleh pada masing-masing laman BPS Provinsi, seperti yang sudah dicantumkan pada tabel 2.1 hingga tabel 2.5.

3.3.5 Belanja Modal

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini, belanja modal adalah sebagai variabel dependen. Samudra & Handayani (2020) mengatakan bahwa belanja modal dapat berupa pembelian aset ataupun memaksimalkan aset yang sudah ada. Pembelian aset dilakukan untuk membeli seperti mesin, tanah dan bangunan, membuat jalan dan aset

tetap lainnya. Sedangkan memaksimalkan aset dengan cara memperbaiki sektor yang diperlukan oleh masyarakat seperti sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian,

Belanja modal = belanja tanah + belanja peralatan dan mesin +
belanja gedung dan bangunan + belanja jalan + belanja aset tetap
lainnya

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda. Analisis model ini digunakan karena penelitian ini memiliki sebuah variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen dalam model persamaan. Tujuan dari regresi adalah memperoleh nilai prediksi yang baik, yaitu nilai prediksi sebisa mungkin berdekatan dengan nilai aktualnya (Widarjono, 2015). Secara umum model regresi linear berganda dapat ditulis sebagai:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + E \quad (3.1)$$

Pada penelitian ini, variabel terikat Y hanya sebuah saja dan variabel bebas ada empat, sehingga persamaan (3.1) dapat disederhanakan menjadi

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + E \quad (3.2)$$

Dengan:

Y: belanja modal;

X₁: PAD;

X₂: dana perimbangan/TKD;

X₃: SiLPA;

X₄: kepadatan penduduk;

B_0 : konstanta persamaan;

$B_1 \dots \beta_4$: koefisien pada masing masing variabel bebas (X_i), dan

E: error persamaan

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Pengolahan data melalui tahapan-tahapan: pengumpulan data, penyiapan data termasuk *data editing* dengan mencermati setiap lembar laporan APBD Kabupaten/Kota dan menyusunnya ke dalam *spread-sheet* berupa data umum (demografi) berdasarkan tahun anggaran, jenis pendapatan daerah, kepadatan penduduk, dan belanja modal dengan menggunakan program Excel. Sebelum menganalisis data, dilakukan uji statistik menggunakan program SPSS. Untuk memastikan bahwa model regresi berganda, yang akan digunakan selanjutnya dalam menganalisis data, merupakan model yang representatif dan layak, perlu dilakukan uji asumsi klasik seperti *normalitas*. Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi dari model regresi. Jika model regresi tidak berdistribusi secara normal maka statistik uji t maupun F tidak dapat diterapkan. Dikatakan normal jika *probability plot residual* berada di sekitar garis horizontal (Heryanto & Triwibowo, 2018).

3.4.2 Metode Analisis Data

Setelah diperoleh hasil uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya data sekunder yang sudah disusun ulang diinput ke komputer dalam *spread-sheet*, kemudian diolah menggunakan Excel dan SPSS dan dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang telah disusun (Indriantoro & Supomo, 2018). Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menguji hipotesis, dengan chi-square test atau t-test yang dapat dilakukan dengan SPSS;
- b. Keterkaitan atau hubungan variabel dependen dengan independen dapat dianalisis dengan regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) untuk mengestimasi besar koefisien persamaan yang bersifat linear, seperti ditunjukkan dalam persamaan (3.2), yang melibatkan dua atau lebih variabel independen dan sebuah variabel dependen. Untuk menentukan keandalan hubungan atau pengaruh digunakan kriteria seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Hubungan nilai koefisien dan kriteria untuk regresi linear berganda

Besar koefisien	Kriteria
0 - 0.20	korelasi/berpengaruh sangat kecil dan bisa diabaikan,
0.21 - 0.40	korelasi/berpengaruh lemah,
0.41 - 0.70	korelasi/berpengaruh cukup,
0.71 - 0.90	korelasi/berpengaruh tinggi/kuat,
0.91 - 1.00	korelasi/berpengaruh sangat tinggi/kuat.

Dengan analisis regresi berganda ini dapat pula dilakukan analisis korelasi dan signifikansi keterkaitan hubungan tersebut.

BAB IV

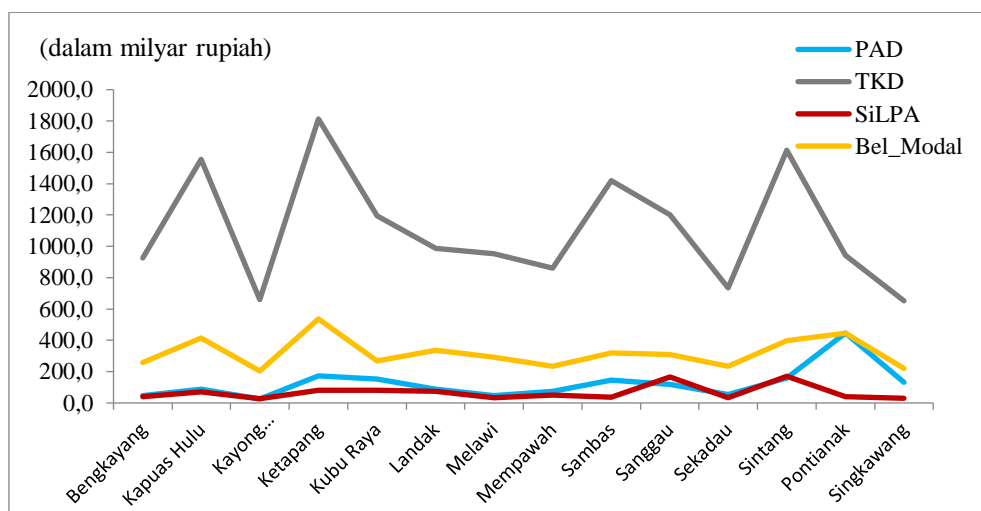
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Data anggaran dan keuangan daerah Kabupaten/Kota diperoleh dari situs Kementerian Keuangan yang dapat secara terbuka diakses setiap saat oleh siapapun. Untuk anggaran tahun 2016-2019 pada Kabupaten/Kota pada Provinsi di Kalimantan disajikan pada lampiran tabel 4.1. Dari data pada lampiran tersebut disusun ulang (yang terkait dengan anggaran) dalam bentuk nominal maupun persentase sehingga dapat dikelompokkan dalam beberapa hal seperti dijelaskan berikut ini.

4.1.1 Komposisi APBD dan Belanja Modal

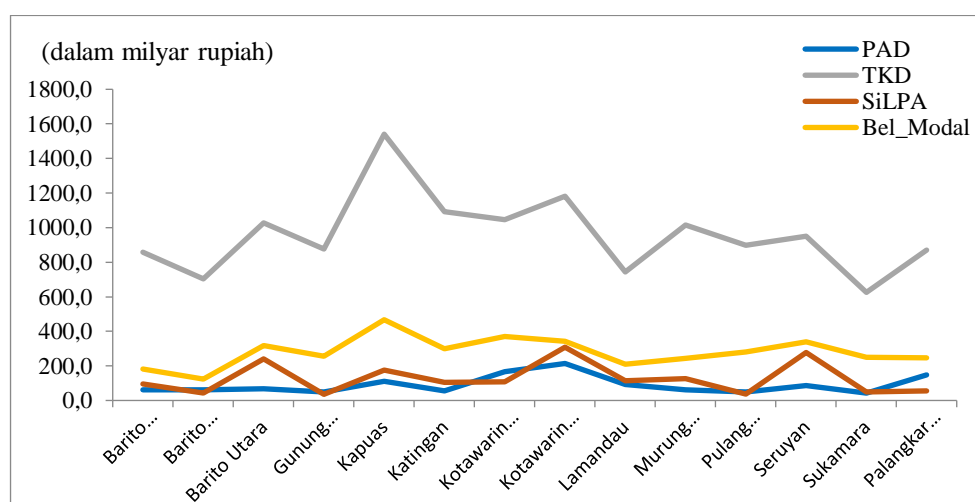
Tabel 4.1 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Tabel tersebut menunjukkan bahwa APBD daerah di Kalbar bersumber dari TKD jauh lebih besar dibanding PAD, SiLPA, ataupun Belanja Modal. PAD beberapa daerah sangat rendah, kecuali kota Pontianak yang terlihat menonjol karena kepadatan penduduk yang besar. Ibukota Provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi biasanya memperoleh PAD yang besar, namun minim sumber alam karena luas daerah yang relatif kecil.

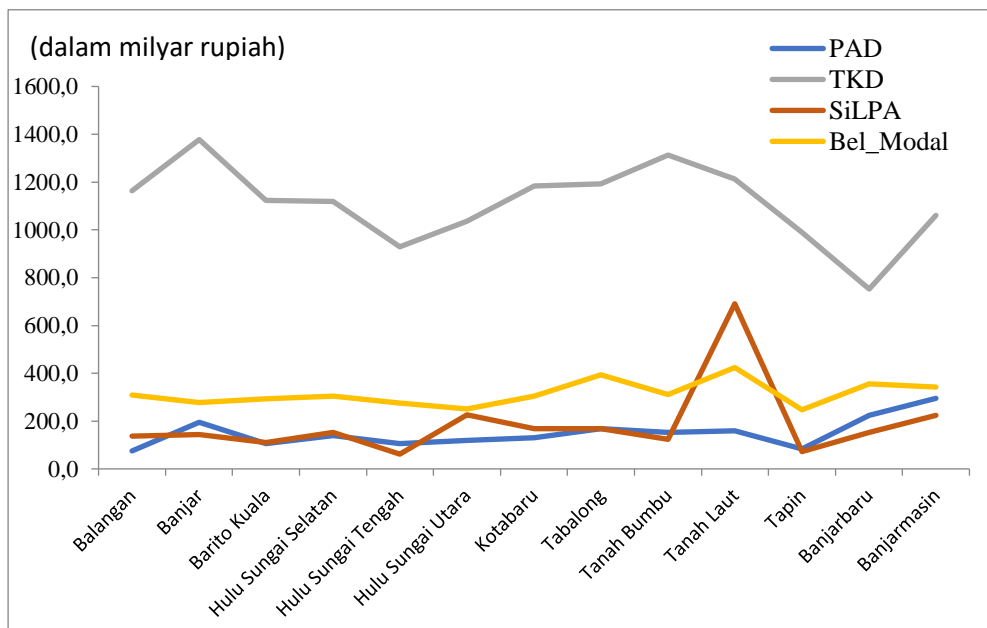
Pada tabel 4.2 di bawah ini menunjukkan bahwa PAD hampir semua Kabupaten/Kota di Kalteng rendah, sementara belanja modal relatif besar, bahkan jika dibanding dengan PAD dan SiLPA dijumlahkan. Terdapat beberapa Kabupaten memperoleh TKD rendah dibanding lainnya, namun Kabupaten Kapuas memperoleh TKD jauh lebih besar dibanding lainnya. Sumber dari TKD masih sangat besar untuk keseluruhan APBD Kabupaten/kota di Provinsi ini.

Tabel 4.2 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalteng (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



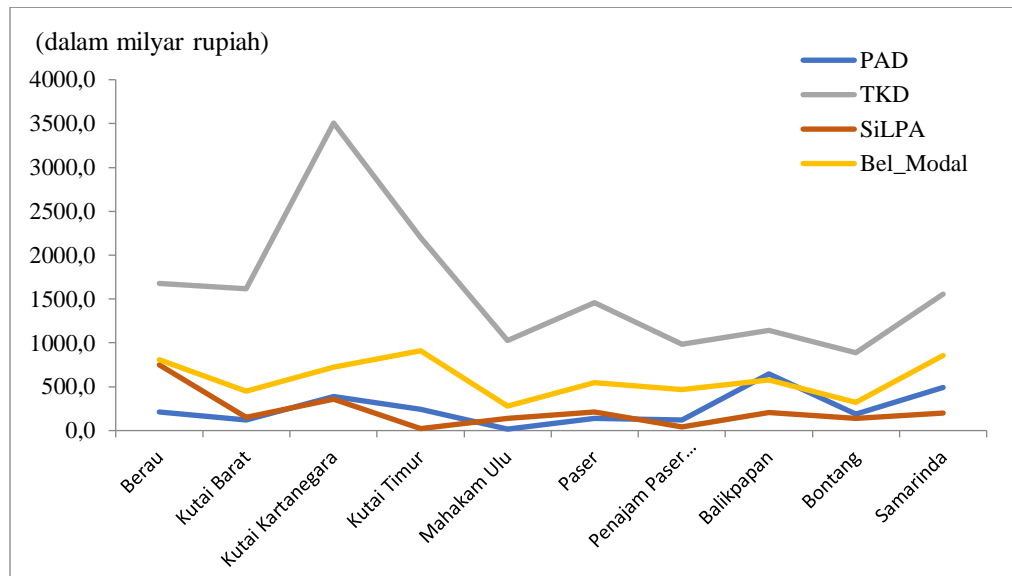
Pada tabel 4.3 berikut ini menunjukkan PAD Kota Banjarbaru dan Banjarmasin relatif besar dibanding daerah lainnya di Kalsel, karena kepadatan penduduk pada kedua Kota ini yang relatif tinggi. Kabupaten lainnya memperoleh PAD yang relatif sama. Alokasi belanja modal juga hampir sama pada hampir semua Kabupaten/Kota di Kalsel. Terdapat keunikan pada SiLPA di Kabupaten Tanah Laut yang sangat menonjol dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Perolehan TKD terlihat hampir sama, kecuali pada Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang relatif kecil.

Tabel 4.3 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Untuk Kabupaten/Kota di Kaltim, seperti pada tabel 4.4 berikut, menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memperoleh TKD yang sangat besar dibanding daerah lainnya, sementara daerah lainnya memperoleh TKD yang tidak jauh berbeda. PAD Kota Balikpapan merupakan yang tertinggi karena kepadatan penduduk yang tinggi, sementara luas daerahnya kecil. Alokasi belanja modal juga relatif tidak jauh berbeda pada hampir semua daerah di Kaltim.

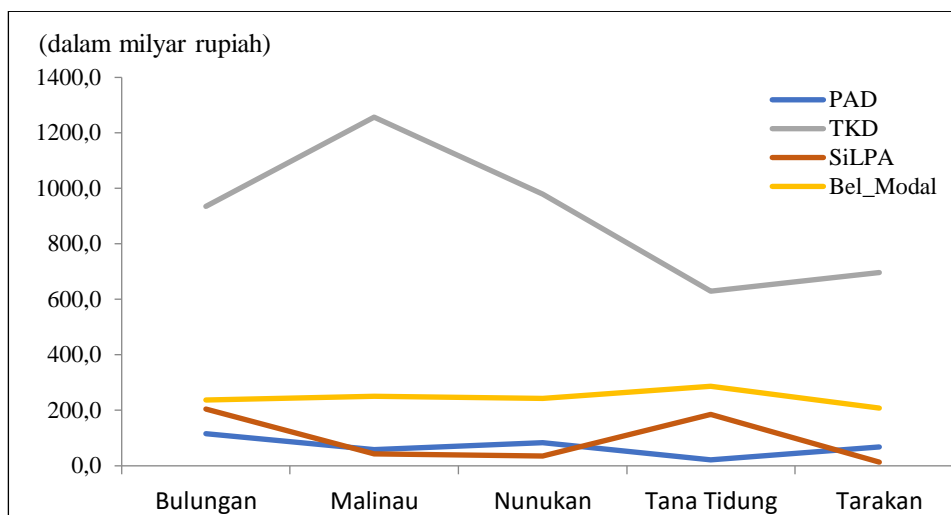
Tabel 4.4 Profil APBD dan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Pada tabel 4.5, daerah-daerah di Kaltara yang merupakan provinsi baru pemekaran dari Kaltim, menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau memperoleh TKD yang menonjol besar dibanding daerah lainnya sedangkan Tanah Tidung yang

memperoleh TKD terkecil. Perolehan PAD maupun alokasi belanja modal hampir sama pada semua daerah di Kaltara ini.

Tabel 4.5 Profil APBD dan belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltara (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)

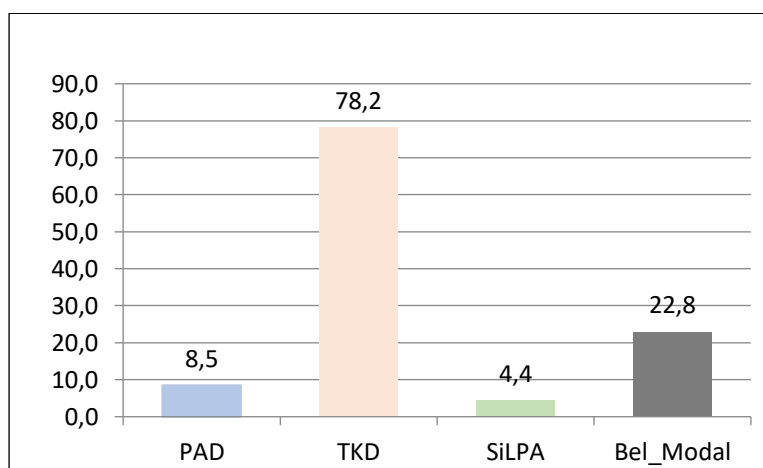


Dari profil yang ditunjukkan pada tabel 4.1 hingga 4.5 ini menunjukkan bahwa PAD kota relatif besar dibanding PAD Kabupaten, namun perolehan TKD Kabupaten relatif lebih besar dibanding Kota. Perolehan TKD terlihat sangat besar dan relatif polanya hampir sama pada kelima Provinsi di Kalimantan ini. Hal ini karena sebagian besar daerah di Kalimantan merupakan daerah pertambangan dan sumber alam lainnya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pusat. Perolehan porsi APBD dan belanja daerah diperlihatkan pada gambar-gambar berikut ini.

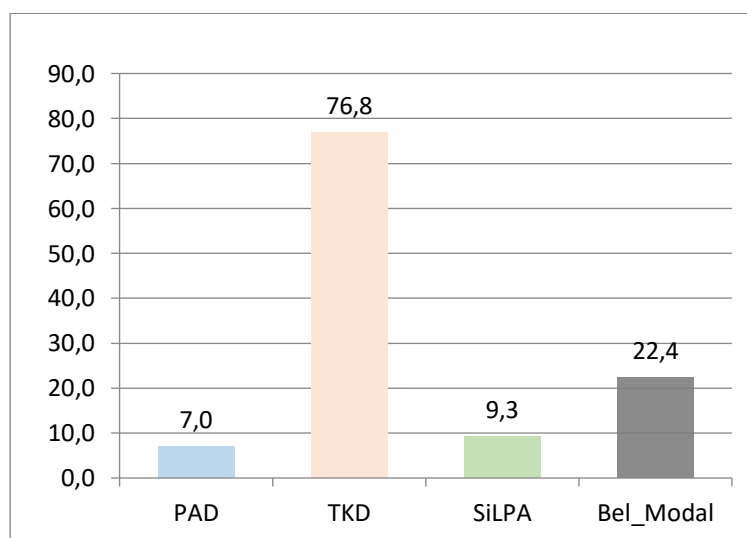
Tabel 4.6 ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Kalbar memperoleh rata-rata TKD lebih dari 3/4 dari APBD, namun PAD sangat rendah bahkan dibanding belanja modal sekalipun. Alokasi

belanja modal sekitar 22,8% dari APBD rata-rata pada tahun 2016 hingga 2019 dirasa cukup memadai. Dari fakta ini menunjukkan bahwa pembiayaan APBD sangat tergantung pada kucuran dana dari pusat berupa TKD ini karena PAD yang rendah.

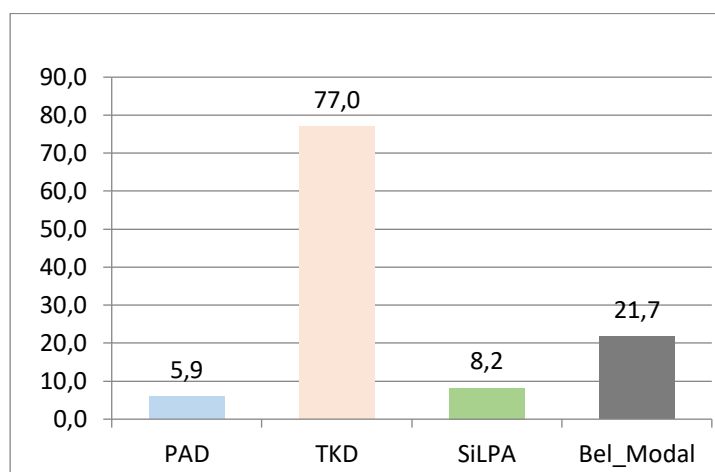
Tabel 4.6 Profil alokasi PAD, TKD, SiLPA d dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalbar (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Tabel 4.7 Profil alokasi APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalteng (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Tabel 4.8 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kaltara (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)

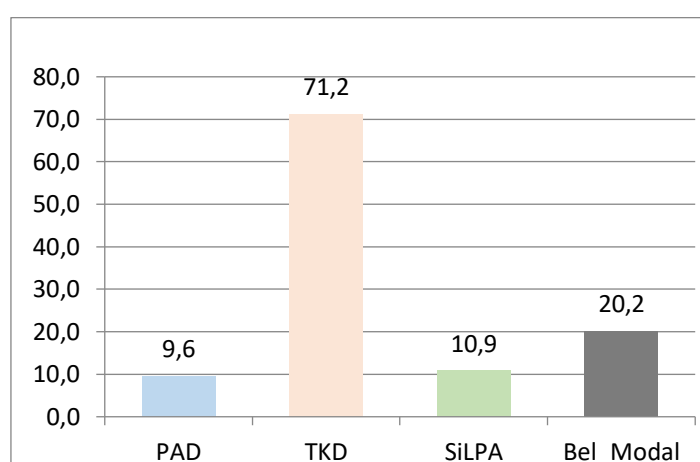


Demikian pula untuk daerah-daerah di Kalteng seperti ditunjukkan pada tabel 4.7 di atas. Besar persentase TKD, PAD, dan alokasi belanja modal relatif hampir sama halnya dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Lebih dari 3/4 sumber APBD berasal dari kucuran dana dari pusat berupa TKD sedangkan PAD dirasa masih rendah. Alokasi belanja modal di atas 20% dianggap memadai seperti halnya alokasi rerata belanja modal pada Kabupaten/Kota di Kalbar. Pada tabel 4.8 berikut juga menunjukkan bahwa profil pada Kabupaten/Kota di Kaltara hampir mirip dengan Kabupaten/Kota di Kalbar maupun di Kalteng. Lebih dari 3/4 APBD mengandalkan dari kucuran dana pusat berupa TKD, dan kurang dari 9% berasal dari PAD.

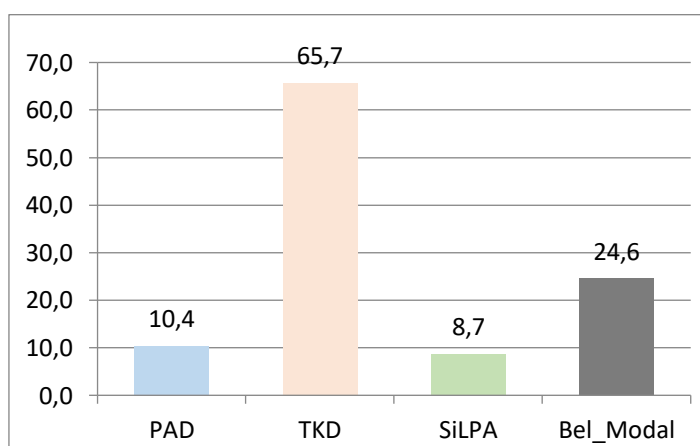
Persentase PAD yang cukup besar didapatkan pada rata-rata Kabupaten/Kota di Kalsel (tabel 4.9) sehingga rerata

prosentase TKD relatif juga berkurang. Hal seperti ini juga diperlihatkan pada daerah-daerah di Kaltim (tabel 4.10) dimana rerata perolehan PAD paling besar dibanding rerata PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi yang ada di Kalimantan. Dari profil yang diperlihatkan di atas mengindikasikan bahwa sebagian besar APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan masih mengandalkan TKD.

Tabel 4.9 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kalsel (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Tabel 4.10 Profil alokasi sumber APBD dan belanja modal (dalam % APBD) rerata Kabupaten/Kota di Kaltim (rerata dari tahun 2016 hingga 2019)



Perolehan PAD di hampir semua daerah di Provinsi yang ada di Kalimantan relatif rendah apalagi daerah yang penduduknya sedikit. Namun daerah-daerah ini, khususnya Kabupaten, memiliki wilayah yang luas bahkan terdapat satu kabupaten yang luasnya hampir seluas Provinsi Jawa Barat. Perolehan PAD yang cukup besar pada Kota terutama ibukota Provinsi. Berdasarkan data lampiran tabel 4.1, klasifikasi perolehan prosentasi PAD terhadap APBD di Kabupaten/Kota di Kalimantan ditunjukkan pada tabel berikut (Taras, 2017).

Tabel 4.11 Klasifikasi perolehan PAD pada Kabupaten/Kota di Kalimantan (dalam %)

Kategori	Rentang	PAD pada tahun Anggaran			
		2016	2017	2018	2019
sangat kurang	< 10%	78,5	62,4	73,2	75,0
kurang	10% - 20%	17,9	28,6	23,2	19,6
sedang	20% - 30%	3,6	5,4	3,6	5,4
cukup baik	30% - 40%	0,0	3,6	0,0	0,0
baik	40% - 50%	0,0	0,0	0,0	0,0
sangat baik	>50%	0,0	0,0	0,0	0,0

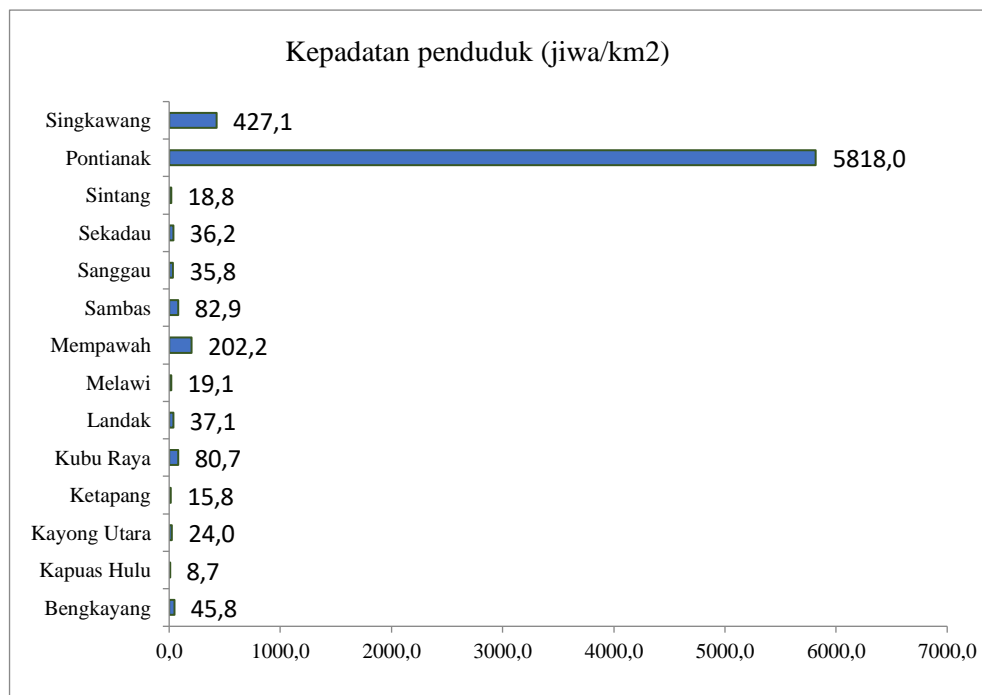
Belanja modal yang dialokasikan dari APBD rata-rata daerah di Kalimantan di atas 20% seperti diperlihatkan pada tabel 4.6 hingga 4.10. Didasarkan atas dengan PAD seperti tergambar pada tabel 4.11 di atas, maka sebagian besar Kabupaten/Kota di Kalimantan masih mengandalkan TKD untuk kebutuhan belanja modal. Alokasi belanja modal pada rata-rata Kabupaten/Kota di Kalimantan relatif cukup memadai.

4.1.2 Profil Kepadatan Penduduk

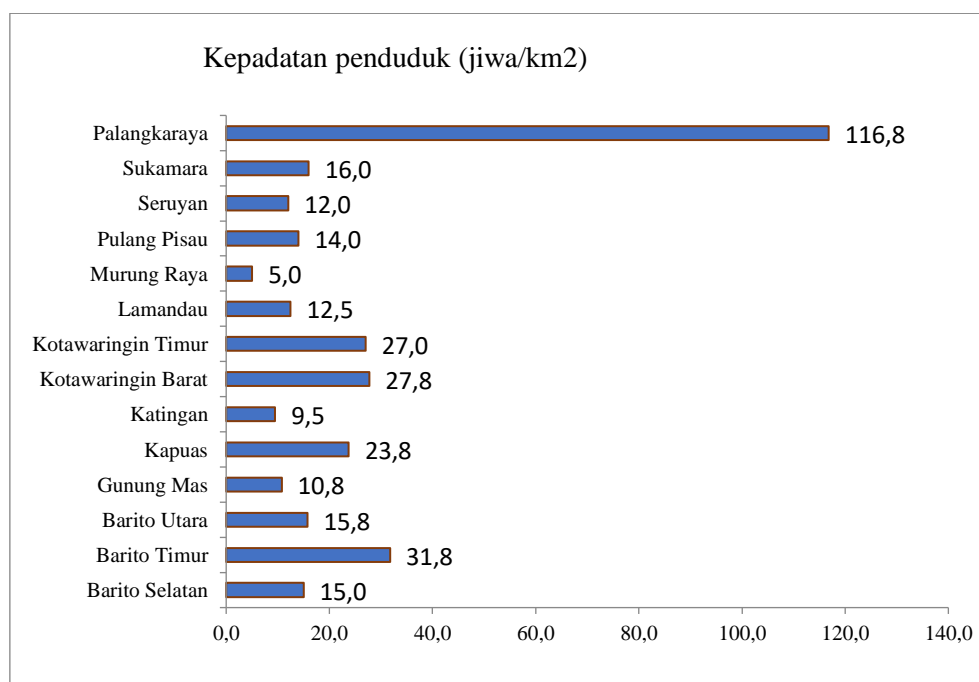
Data pada lampiran tabel 4.1 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kalimantan cenderung bertambah. Pertambahan yang signifikan terlihat pada beberapa kota, khususnya ibukota Provinsi, dan kota-kota di Kaltara. Bisajadi hal ini menunjukkan kecenderungan perpindahan penduduk dari daerah lain, atau memang tingkat pertambahan penduduk yang menaik. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalimantan relatif lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota di Jawa, Sumatra, atau Sulawesi. Profil rerata kepadatan penduduk pada 2016-2019 di Kabupaten/Kota di Kalimantan diperlihatkan berikut ini.

Di Kalbar, seperti pada tabel 4.12 berikut, kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota yang terlihat hampir sama, kecuali Pontianak yang terlihat sangat padat. Agak berbeda pada Kalteng seperti diperlihatkan pada tabel 4.13 yang menunjukkan sebaran penduduk di Palangka Raya (sebagai ibukota Provinsi) relatif tidak terlalu jauh dibanding beberapa daerah lainnya di Provinsi tersebut, tidak seperti halnya di Pontianak.

Tabel 4.12 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalbar dalam rentang 2016-2019

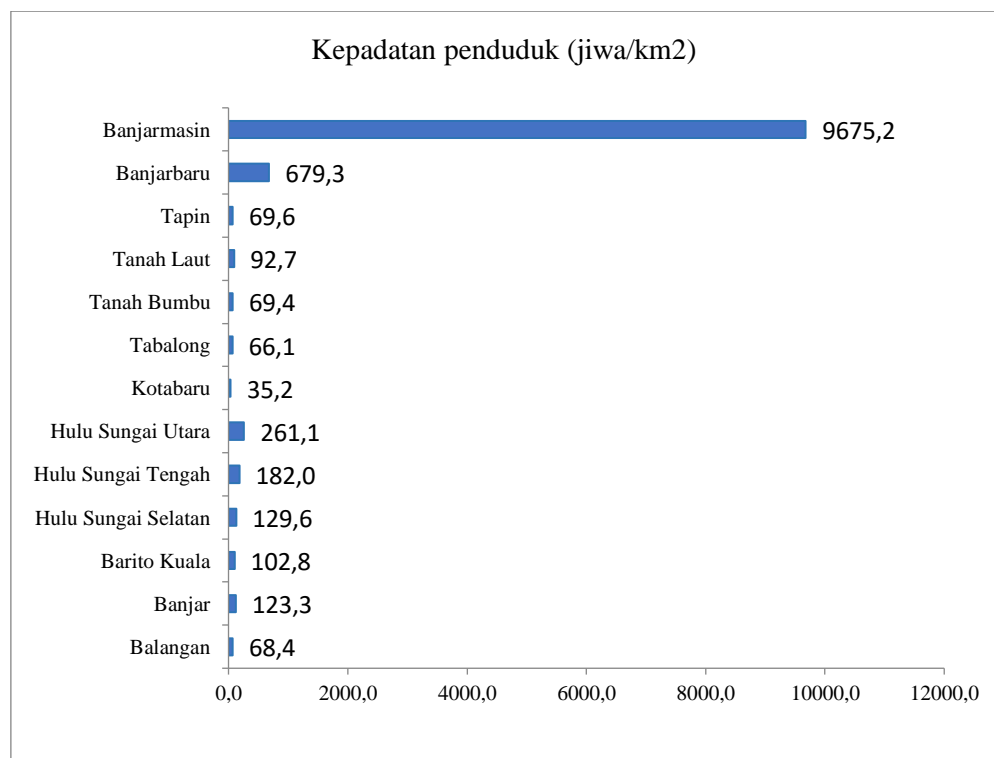


Tabel 4.13 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalteng dalam rentang 2016-2019

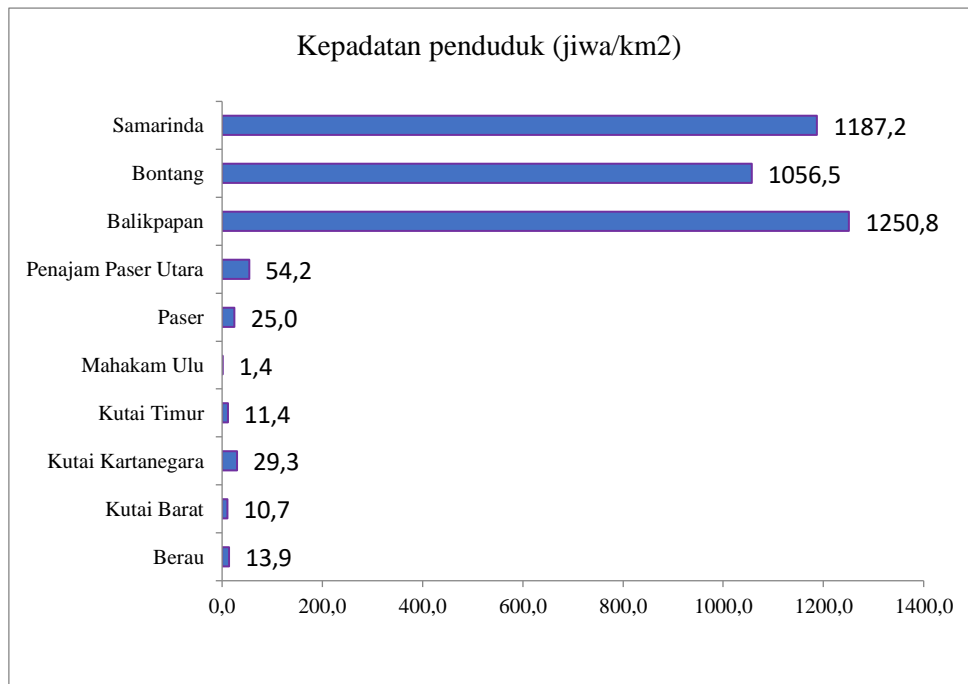


Kondisi yang mirip dengan Kalbar ditunjukkan pada tabel 4.14 dimana kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin sangat berbeda sekali dengan daerah lainnya di provinsi yang sama. Kepadatan penduduk Kota-kota di Kaltim relatif mirip dan sangat berbeda dengan Kabupaten pada tabel 4.15. Ibukota Kaltara (tabel 4.16) juga menunjukkan kepadatan penduduknya sangat tinggi dibanding Kabupaten lain di provinsi yang sama.

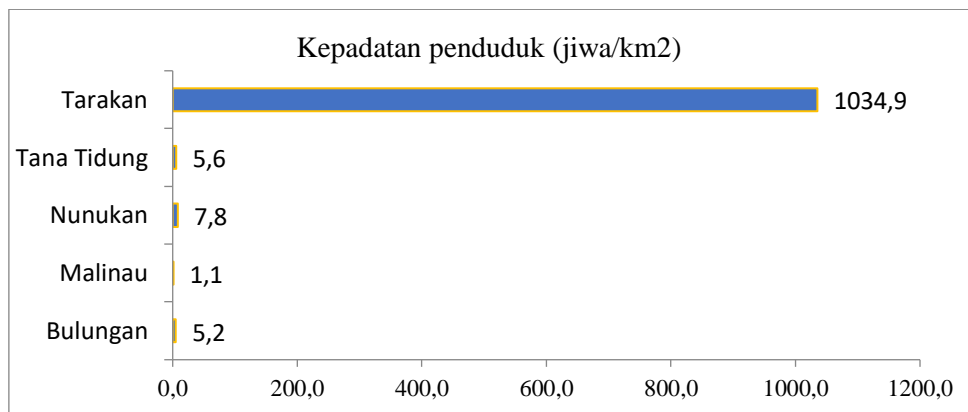
Tabel 4.14 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kalsel dalam rentang 2016-2019



Tabel 4.15 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kaltim dalam rentang 2016-2019



Tabel 4.16 Profil rerata kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota di Kaltara dalam rentang 2016-2019



Dari tabel 4.12 hingga 4.16 menggambarkan adanya kemiripan sebaran penduduk di Kabupaten/Kota di Kalimantan. Sebagai ibukota Provinsi dengan luas daerah yang kecil, tingkat kepadatan penduduk ibukota Provinsi di Kalimantan sangat tinggi dibanding kota-kota Kabupaten yang luas daerahnya besar, seperti ditunjukkan pada tabel 4.12 hingga 4.16 tersebut.

4.2 Hasil Uji Regresi

Data seperti disajikan pada lampiran tabel 4.1 dikelompokkan kembali menurut jenisnya (PAD, TKD, SiLPA, Belanja Modal, dan Kepadatan Penduduk) dalam rentang tahun 2016-2019 kemudian disusun nilai reratanya (nominal dan prosentase) pada rentang tahun tersebut seperti ditunjukkan pada lampiran tabel 4.2. Data dengan nilai rerata ini yang kemudian diolah secara statistik menggunakan SPSS seperti disajikan berikut ini.

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dengan menggunakan test Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,200 yang artinya nilai residual variable terdistribusi normal. Sebaran data diperlihatkan pada lampiran gambar 4.1 dan 4.2.

4.2.2 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis seperti diperlihatkan pada lampiran tabel 4.5 tabel menunjukkan bahwa variabel independent terhadap variabel dependen berpengaruh. Pada lampiran tabel 4.6

nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 5%. Nilai sebesar ini mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak digunakan, dan hasil uji regresi berganda selanjutnya dapat digunakan. Untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan pada lampiran tabel 4.7

Berdasarkan lampiran tabel 4.7 hanya variabel PAD dan TKD yang berpengaruh terhadap belanja modal. Koefisien regresi PAD terhadap belanja modal sebesar 0,439 dan TKD terhadap belanja modal sebesar 0,483 yang mengindikasikan bahwa keduanya berpengaruh terhadap belanja modal. SiLPA dan kepadatan penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4.2.3 Analisis Hasil

4.2.3.1 Analisis Realisasi Belanja Modal

Proporsi belanja modal di Kabupaten/Kota di Kalimantan pada tahun anggaran 2016 hingga 2019 tidaklah tetap/konstan, ada sebagian yang meningkat namun terdapat pula yang justru sebagian besar menurun, seperti ditunjukkan pada lampiran tabel 4.3. Proporsi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Kaltim lebih baik dibanding daerah-daerah provinsi lain di Kalimantan, bisa jadi karena PAD dan TKD di Kaltim lebih besar dibanding daerah lainnya di Kalimantan. Berdasarkan Nurhidayati & Yaya (2013), klasifikasi proporsi belanja modal Pemerintah

Daerah pada populasi yang diamati dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.17 Profil Realisasi belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan

Katagori	Rentang	Tahun Anggaran			
		2016	2017	2018	2019
Kurang	< 10%	0	0	0	0
Sedang	10% s/d 20%	8	19	27	28
Baik	20% s/d 30%	36	32	25	25
sangat baik	> 30%	12	5	4	3

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2019 proporsi belanja modal katagori baik mengalami penurunan. Hasil penelitian Nurhidayati & Yaya (2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2012 proporsi belanja modal di Indonesia masih terdapat pada katagori kurang sekitar 3,5% dan sekitar 48% masih berada di katagori sedang. Jika dibandingkan dengan proporsi belanja modal di Kalimantan, Kabupaten/Kota di Kalimantan seperti ditunjukkan pada tabel di atas memiliki proporsi belanja modal yang relatif lebih baik dari hasil penelitian Nurhidayati tersebut.

4.2.3.2 Regresi Linear

Didasarkan atas semua hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai residual variabel terdistribusi secara normal menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test seperti diperlihatkan pada lampiran tabel 4.4. Hasil uji

regresi berganda pada lampiran tabel menyatakan bahwa hanya variabel PAD dan TKD yang berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

1) Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Dalam penyusunan APBD, alokasi untuk belanja modal biasanya disesuaikan dengan PAD. Jika rencana penerimaan PAD besar atau meningkat maka alokasi belanja modal umumnya juga meningkat. Dari rerata data tahun anggaran yang dianalisis menunjukkan nilai koefisien regresi adalah 0,439 yang jika didasarkan pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh cukup. Berdasarkan profil realisasi PAD dan alokasi Belanja Modal pada tabel 4.10 hingga tabel 4.15 menunjukkan, hampir pada semua daerah, besar PAD berbanding lurus dengan besar belanja modal. Hasil ini bersesuaian dengan hasil beberapa penelitian, antara lain Wati (2017), Juniawan (2018), Priatna (2019), dan Widiasmara (2019) yang menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dikarenakan PAD merupakan satu-satunya pendapatan daerah dimana pemerintah daerah memiliki kontrol penuh dalam pengelolaannya sehingga alokasi Belanja Modal saat penyusunan APBD didasarkan atas perkiraan realisasi PAD.

2) Pengaruh TKD terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji statistik seperti ditampilkan dalam tabel Anova menunjukkan bahwa TKD, seperti halnya PAD, berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan nilai koefisien regresi 0,483 dan didasarkan pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa TKD berpengaruh cukup.

3) Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji statistik seperti ditampilkan dalam tabel Anova menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Seperti telah terlihat pada tabel 4.10 hingga tabel 4.15 menunjukkan bahwa profil SiLPA cenderung berbanding terbalik terhadap Belanja Modal. Terdapat sebagian daerah dengan SiLPA menaik atau menurun diiringi dengan menaik atau menurunnya Belanja Modal. Sementara pada daerah lainnya tidak menunjukkan kecenderungan, bahkan sebagian berpengaruh negatif.

4) Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Belanja Modal

Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa kepadatan penduduk ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap Belanja Modal. Kepadatan penduduk suatu daerah biasanya relatif konstan dalam beberapa tahun, walaupun bertambah atau berkurang biasanya relatif sangat kecil sehingga penambahan akan terasa

signifikan untuk waktu relatif lama. Dengan asumsi seperti ini tidak menunjukkan kecenderungan menaik atau menurun. Artinya walaupun belanja modal bertambah ataupun berkurang, kepadatan penduduk cenderung tetap atau tidak mengalami penambahan. Hasil seperti ini kurang lebih sama dengan hasil penelitian yang dilakukan antara lain oleh Ginting (2017), Sari (2019), dan Widiasmara (2019).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil olah data menggunakan Excel telah disajikan data dan profil anggaran dan belanja modal Kabupaten/Kota di Kalimantan untuk tahun 2016 hingga 2019 yang telah disusun ulang dari sumber resmi pemerintah. Uji statistik menggunakan program SPSS telah menunjukkan bahwa data terdistribusi normal seperti ditunjukkan dari hasil uji normalitas serta grafik dan sebaran residual data variabel terdistribusi normal sehingga uji statistik regresi layak dilanjutkan.

Dari hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh PAD, TKD, SiLPA, dan Kepadatan penduduk terhadap Belanja Modal Daerah di Kalimantan diperoleh hasil bahwa:

1. PAD berpengaruh positif sebesar 43,9% terhadap belanja modal dan TKD berpengaruh positif sebesar 48,3% terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan;
2. sedangkan SiLPA dan Kepadatan Penduduk tidak memberikan pengaruh.

5.2 Saran

Dari hasil uji regresi dan analisis yang telah penulis jelaskan, penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan baik terkait data dan uji regresi maupun analisis yang telah diungkapkan penulis. Untuk itu penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. memperluas cakupan data sampel, baik pada cakupan daerah atau provinsi maupun tahun anggaran;
2. menambahkan korelasi antar variabel bebas;
3. menambah variabel bebas seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia
4. menggunakan variabel intervening yang dapat menguatkan hubungan antar variabel seperti pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan; atau
5. menggunakan metode analisis yang lain, misalnya SEM.

DAFTAR REFERENSI

- Angelina, C., J. Janice, C. Clarina, W. W. Fanjaya, dan J. Jesisca. 2020. Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Owner*, 4(1), 138.
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2019-2020 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua). T. I. dan P. Direktorat Statistik Keuangan, Ed.
- BPKD Rejang Lebong. 2019. *Ini 'Catatan' Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal*. <https://bpkd.rejanglebongkab.go.id/ini-catatan-menkeu-terhadap-pengelolaan-apbd-yang-kurang-optimal/?amp=1>
- Ginting, R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 4.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 53–64.
- Hardiningsih, A. P. dan I. N. Wakhidati. (2017). Karakteristik Daerah Terhadap Modal Dengan Pemoderasi Pertumbuhan Ekonomi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(1), 53–66.
- Heryanto, Imam dan Totok Triwibowo. (2018). *Path Analysis Menggunakan SPSS dan Exell*. Informatika Bandung.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3.
- Juniawan, M. A, dan N. P. S. Suryantini. (2018). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255.
- Karunia, S. (2020). “Desentralisasi: Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Radardepok.Com.

- Kemenkeu RI. (2019). “Ini “Catatan” Menkeu Terhadap Pengelolaan APBD yang Kurang Optimal”. <https://bpkd.rejanglebongkab.go.id/ini-catatan-menkeu-terhadap-pengelolaan-apbd-yang-kurang-optimal/?amp=1>
- Maesa, P. P., Putra, E., Heny, M., & Dewi, U. (2018). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. *E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA*, 7(7), 2163–2189.
- Mahmudi. (2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, Dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, Dan Politik*. UPP AMP YKPN.
- Mamuka, V. dan I. Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)*, 2(1), 646–655.
- Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 362–371.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Nurhidayati, L. L. dan R. Yaya. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Pitoko, R. A., (2018). “Belanja RAPBN 2019 Ditargetkan Rp 2,439,7 Triliun”. Kompas.com <https://pemilu.kompas.com/read/2018/08/16/150837826/rapbn-2019-ditargetkan-rp-24397-triliun>.
- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.
- Samudra, G., dan N. Handayani. (2020). Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9.

- Saputra, R. dan Darwanis. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 183–199.
- Sari, P. dan N. H. Ningsih. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui PAD, DAU, dan DAK Sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(2), 99–112.
- Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130.
- Siswiyanti, P. (2015). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akrua*, 7(1).
- Sholikhah, I., dan A. Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 553(4).
- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung, Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360-2387.
- Tri Haryanto, J. (2021). Beda SILPA, SiLPA dan Keterkaitan Dana Iddle di Daerah. *Neraca.Co.Id*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39830>
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. [https://peraturan.bpk.go.id / Home / Details / 38685 / uu-no-23-tahun-2014](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232782/uu-no-28-tahun-2022?a=kode>
- Wati, M. R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76.

Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data APBD Kabupaten/Kota di Provinsi di Kalimantan

Kabupaten/Kota	Tahun 2016							Tahun 2017						
	Pendapatan dan Belanja Daerah (dalam milyar rupiah)						Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pendapatan dan Belanja Daerah (dalam milyar rupiah)						Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	PAD	TKD	Lain-nya	SiLPA	Pendpt. Daerah	Belanja Modal		PAD	TKD	Lain-nya	SiLPA	Pendpt. Daerah	Belanja Modal	
Kalimantan Barat														
1 Bengkayang	42,7	879,6	129,6	98,4	1051,9	339,2	45,0	45,6	986,5	46,2	45,1	1078,3	320,5	45,0
2 Kapuas Hulu	67,1	1516,8	123,8	98,9	1707,8	516,7	8,4	131,2	1516,9	36,7	74,0	1684,9	363,7	8,4
3 Kayong Utara	10,8	624,6	65,0	37,0	700,5	232,1	23,5	36,5	683,9	65,6	22,2	786,0	258,7	23,5
4 Ketapang	135,0	1693,7	69,2	111,1	1897,9	372,8	15,5	168,0	1765,1	62,8	56,8	1995,9	456,5	15,5
5 Kubu Raya	101,3	1135,3	149,8	43,6	1386,3	300,9	79,4	152,0	1142,2	110,5	80,5	1404,7	256,2	79,4
6 Landak	57,2	989,6	343,4	101,4	1390,2	513,4	36,6	124,4	990,7	172,2	68,7	1287,3	309,3	36,6
7 Melawi	34,1	876,3	146,4	27,6	1056,9	332,9	18,7	67,2	944,5	167,7	8,9	1179,4	373,0	18,7
8 Mempawah	65,1	871,4	91,0	93,1	1027,5	388,3	199,8	71,8	839,6	83,4	16,4	994,8	209,6	199,8
9 Sambas	102,1	1363,3	65,5	61,2	1530,8	327,9	82,3	200,3	1380,7	53,0	12,5	1634,0	319,5	82,3
10 Sanggau	93,3	1057,6	174,9	301,0	1325,8	334,2	35,1	151,9	1181,4	191,1	152,8	1524,4	323,1	35,1
11 Sekadau	36,6	707,5	38,6	74,2	782,7	272,1	35,9	72,8	738,9	33,2	18,0	844,9	241,6	35,9
12 Sintang	108,4	1496,8	69,4	184,6	1674,6	442,7	18,6	113,2	1699,2	138,3	98,5	1950,6	435,4	18,6
13 Pontianak	389,4	895,5	133,6	46,3	1418,5	403,9	5727,9	476,1	913,2	156,4	20,5	1545,6	445,3	5727,9
14 Singkawang	103,3	641,3	45,6	49,7	790,1	231,5	419,7	132,1	642,4	71,4	3,6	846,0	199,0	419,7
Kalimantan Tengah														
1 Barito Selatan	44,0	841,4	46,7	98,4	932,0	163,5	15,0	49,3	838,8	43,5	84,6	931,6	133,6	15,0

2	Barito Timur	34,4	692,0	130,9	93,5	857,3	158,4	31,0	100,4	609,1	105,9	46,0	815,4	127,6	31,0
3	Barito Utara	56,8	1102,4	60,7	178,9	1219,9	310,5	15,0	64,8	951,4	59,6	284,2	1075,8	379,8	16,0
4	Gunung Mas	37,5	824,2	119,0	77,3	980,7	292,8	10,0	36,5	863,8	135,8	47,0	1036,1	313,9	11,0
5	Kapuas	85,8	1519,0	110,9	248,7	1715,7	520,0	23,0	93,7	1505,7	125,3	203,9	1724,7	467,1	24,0
6	Katingan	46,3	1019,6	59,1	154,6	1124,9	309,4	9,0	53,0	1049,4	60,2	114,9	1162,6	363,0	9,0
7	Kotawaringin Barat	143,3	1058,1	121,1	98,9	1322,6	382,6	27,0	176,9	1059,1	81,3	99,6	1317,3	403,3	27,0
8	Kotawaringin Timur	189,4	1211,5	282,5	183,2	1683,4	293,6	26,0	246,0	1109,4	223,7	319,8	1579,1	256,1	27,0
9	Lamandau	45,6	856,6	40,9	126,0	943,1	333,1	12,0	162,5	677,9	24,0	141,7	864,4	233,5	12,0
10	Murung Raya	33,9	1034,0	127,2	209,0	1195,0	388,5	5,0	68,7	966,8	126,4	93,2	1161,8	219,8	5,0
11	Pulang Pisau	38,1	906,0	52,2	60,6	996,2	348,6	14,0	36,2	874,0	43,8	34,2	954,0	310,2	14,0
12	Seruyan	56,9	894,6	90,6	225,2	1042,1	357,7	11,0	110,7	951,3	38,0	238,7	1100,1	321,3	12,0
13	Sukamara	38,6	688,6	17,3	49,4	744,5	343,4	15,0	49,9	603,1	20,6	40,8	673,5	253,2	16,0
14	Palangkaraya	120,0	887,6	121,1	103,7	1128,7	285,7	112,0	150,9	850,3	92,5	34,3	1093,8	240,9	115,0
Kalimantan Selatan															
1	Balangan	61,5	1218,2	50,9	49,3	1330,6	343,8	66,8	87,9	963,9	60,5	240,7	1112,2	327,3	67,9
2	Banjar	189,9	1434,5	87,1	131,2	1711,5	295,9	120,6	179,7	1290,9	159,0	151,2	1629,6	234,2	122,4
3	Barito Kuala	62,7	1172,1	54,5	102,2	1289,3	418,9	100,9	92,1	1018,7	113,2	63,6	1224,0	215,7	102,2
4	Hulu Sungai Selatan	115,1	1244,9	59,3	98,4	1419,4	374,3	127,4	142,5	937,9	63,1	194,8	1143,6	236,5	128,9
5	Hulu Sungai Tengah	97,0	1020,2	150,6	51,3	1267,8	340,2	178,9	118,4	947,6	59,2	62,1	1125,2	324,7	181,0
6	Hulu Sungai Utara	95,4	1244,9	52,0	341,4	1392,3	377,8	256,0	131,6	894,5	56,5	218,6	1082,6	190,2	259,4
7	Kotabaru	140,3	1186,8	92,8	388,2	1419,9	378,9	34,4	118,0	1111,3	149,3	250,9	1378,6	264,1	34,9
8	Tabalong	145,0	1374,5	98,5	160,5	1618,0	471,5	64,6	180,4	1018,3	109,8	274,6	1308,5	399,2	65,6
9	Tanah Bumbu	116,2	1235,4	113,0	42,5	1464,6	272,9	66,8	149,6	1084,1	92,5	101,2	1326,2	218,1	68,5
10	Tanah Laut	148,7	1221,1	80,2	1039,2	1450,0	614,2	90,7	187,2	919,1	257,8	695,4	1364,1	509,1	92,1
11	Tapin	57,2	1008,9	62,2	118,4	1128,3	338,4	68,3	84,9	840,4	70,9	66,8	996,1	192,9	69,1

12	Banjarbaru	169,2	823,3	74,3	203,7	1066,9	473,5	650,6	230,6	700,4	79,9	116,9	1010,9	307,2	669,6
13	Banjarmasin	247,3	1118,8	153,6	116,2	1519,7	359,4	9502,5	325,0	1000,5	155,7	123,7	1481,1	227,1	9622,1
Kalimantan Timur															
1	Berau	208,3	1569,6	223,4	939,4	2001,2	787,8	24,2	188,4	1240,1	429,1	643,9	1857,6	517,6	10,2
2	Kutai Barat	83,0	1568,6	195,5	55,8	1847,1	438,6	10,7	131,7	1174,6	368,3	97,3	1674,6	343,9	10,7
3	Kutai Kartanegara	267,2	3548,8	314,4	216,8	4130,5	598,7	28,3	435,5	2646,0	321,1	394,8	3402,6	548,0	28,9
4	Kutai Timur	477,8	2221,2	423,7	17,5	3122,7	1125,4	10,7	174,6	1535,3	603,1	16,9	2313,0	606,8	11,2
5	Mahakam Ulu	18,7	997,5	112,4	137,4	1128,6	291,3	1,3	12,1	810,6	163,5	289,2	986,2	295,0	1,4
6	Paser	117,7	1492,8	225,4	26,9	1835,9	325,5	24,2	112,6	1101,9	318,9	335,6	1533,5	457,8	24,7
7	Penajam Paser Utara	224,7	990,2	123,6	24,6	1338,4	408,0	53,4	103,6	726,7	161,7	55,8	992,0	259,9	53,9
8	Balikpapan	560,4	1142,9	290,1	227,9	1993,4	564,3	1222,0	612,3	970,0	291,7	102,6	1874,0	451,9	1241,6
9	Bontang	170,1	915,5	118,1	26,0	1203,6	247,7	1022,9	169,1	724,9	166,4	74,1	1060,4	221,5	1045,8
10	Samarinda	391,4	1623,0	423,3	73,5	2437,6	695,7	1156,0	519,6	1252,1	516,8	179,2	2288,6	702,0	1177,1
Kalimantan Utara															
1	Bulungan	101,7	1037,2	98,2	332,3	1237,1	344,7	0,4	112,4	812,2	93,2	237,1	1017,7	160,3	0,4
2	Malinau	53,0	1261,6	173,1	20,4	1487,6	327,4	0,1	59,3	1187,6	68,8	92,0	1315,7	329,2	0,1
3	Nunukan	71,8	1075,8	147,0	30,3	1294,5	284,6	0,6	79,4	974,0	138,1	69,6	1191,5	269,3	0,6
4	Tana Tidung	21,0	698,5	26,1	409,4	745,6	418,7	5,1	26,0	569,1	37,7	236,5	632,8	375,4	5,2
5	Tarakan	62,2	706,4	245,9	22,7	1014,5	236,5	1005,6	67,1	595,8	121,4	14,5	784,3	175,2	1008,9

Kabupaten/Kota	Tahun 2018							Tahun 2019							
	Pendapatan dan Belanja Daerah (dalam milyar rupiah)						Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Pendapatan dan Belanja Daerah (dalam milyar rupiah)						Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	PAD	TKD	Lain-nya	SiLPA	Pendpt. Daerah	Belanja Modal		PAD	TKD	Lain-nya	SiLPA	Pendpt. Daerah	Belanja Modal		
Kalimantan Barat															

1	Bengkayang	50,5	866,8	87,1	8,5	1004,4	189,8	46,0	52,0	965,2	96,9	5,1	1114,0	180,6	47,0
2	Kapuas Hulu	76,0	1530,8	87,5	77,8	1694,3	363,9	9,0	80,0	1657,8	99,8	28,9	1837,6	412,3	9,0
3	Kayong Utara	27,2	636,6	93,2	14,5	757,0	168,4	24,0	28,6	688,3	60,3	35,0	777,2	156,8	25,0
4	Ketapang	190,4	1810,3	167,9	53,4	2168,6	619,1	16,0	195,2	1983,3	196,7	98,6	2375,2	696,9	16,0
5	Kubu Raya	184,5	1277,1	115,6	86,0	1577,3	316,1	81,0	172,8	1227,1	133,4	113,0	1533,4	205,6	83,0
6	Landak	79,0	989,8	262,5	59,2	1331,2	279,4	37,0	92,9	982,1	302,2	65,6	1377,1	241,8	38,0
7	Melawi	40,8	943,7	75,6	12,5	1060,1	180,7	19,0	40,6	1039,7	81,9	77,7	1162,2	281,9	20,0
8	Mempawah	75,8	874,2	82,6	42,0	1032,6	167,9	202,0	87,6	856,9	87,9	44,3	1032,4	176,2	207,0
9	Sambas	127,7	1425,1	146,7	28,4	1699,5	286,7	83,0	148,9	1513,5	172,4	44,2	1834,8	339,9	84,0
10	Sanggau	117,5	1173,3	280,1	76,8	1570,9	265,4	36,0	117,5	1393,9	141,3	135,3	1652,7	313,0	37,0
11	Sekadau	59,1	751,3	75,5	0,0	885,8	227,4	36,0	45,4	737,5	94,5	45,3	877,4	191,0	37,0
12	Sintang	240,6	1600,3	133,1	152,5	1974,0	336,0	19,0	172,3	1651,9	149,4	246,0	1973,6	378,6	19,0
13	Pontianak	440,4	959,3	263,5	22,2	1663,2	490,8	5817,0	478,8	1002,6	282,7	70,7	1764,0	437,3	5999,0
14	Singkawang	130,9	659,5	88,7	28,8	879,1	242,2	427,0	166,2	664,6	89,2	44,5	920,0	208,3	442,0
Kalimantan Tengah															
1	Barito Selatan	81,4	881,2	30,5	97,7	993,1	204,4	15,0	77,3	873,1	56,1	95,6	1006,5	225,1	15,0
2	Barito Timur	47,8	701,4	119,3	8,6	868,5	92,3	32,0	58,0	809,4	49,5	30,1	917,0	117,1	33,0
3	Barito Utara	71,4	988,7	65,7	292,9	1125,8	285,3	16,0	74,3	1061,4	117,4	201,3	1253,2	299,0	16,0
4	Gunung Mas	42,2	905,5	51,3	8,3	998,9	252,4	11,0	76,2	906,2	63,2	9,6	1045,6	169,3	11,0
5	Kapuas	107,7	1469,8	115,8	148,0	1693,3	425,6	24,0	162,3	1667,5	137,6	103,2	1967,5	455,4	24,0
6	Katingan	53,3	1147,4	60,1	88,5	1260,7	336,8	10,0	66,1	1147,6	72,0	61,7	1285,6	188,1	10,0
7	Kotawaringin Barat	179,8	996,9	114,7	115,6	1291,5	340,8	28,0	170,2	1067,9	119,3	120,7	1357,4	357,8	29,0
8	Kotawaringin Timur	200,1	1168,4	278,2	374,6	1646,8	344,2	27,0	220,5	1237,4	342,3	355,8	1800,1	481,7	28,0
9	Lamandau	89,4	708,7	40,4	99,4	838,5	140,9	13,0	70,7	730,1	50,5	90,4	851,3	132,4	13,0
10	Murung Raya	59,8	1015,2	154,0	127,2	1229,0	230,4	5,0	80,1	1046,4	75,7	75,0	1202,3	139,9	5,0
11	Pulang Pisau	42,6	943,1	46,8	9,7	1032,5	254,7	14,0	81,4	872,5	55,3	47,4	1009,1	210,3	14,0
12	Seruyan	93,3	978,1	55,2	283,6	1126,6	314,8	12,0	89,0	981,6	52,4	364,3	1123,0	365,0	13,0

13	Sukamara	44,6	613,1	33,6	27,0	691,3	220,0	16,0	37,4	596,5	32,0	75,9	665,9	183,6	17,0
14	Palangkaraya	154,6	884,1	114,1	5,6	1152,8	232,3	118,0	172,4	862,9	97,3	77,6	1132,6	222,6	122,0
Kalimantan Selatan															
1	Balangan	68,7	1143,6	75,0	99,2	1287,2	265,5	68,9	82,5	1331,2	100,6	159,7	1514,3	298,4	70,0
2	Banjar	185,4	1273,8	126,7	104,4	1585,9	237,6	124,3	223,0	1511,6	167,0	190,2	1901,7	339,7	126,0
3	Barito Kuala	189,5	1224,5	340,2	116,3	1754,2	264,6	103,5	80,6	1076,2	133,7	155,9	1290,5	277,7	104,7
4	Hulu Sungai Selatan	131,6	1085,3	89,3	129,9	1306,1	263,7	130,3	168,0	1206,7	119,6	187,3	1494,2	341,0	131,7
5	Hulu Sungai Tengah	91,3	862,3	200,4	11,2	1154,0	202,5	183,0	118,1	889,5	233,2	122,5	1240,8	238,2	185,1
6	Hulu Sungai Utara	104,8	967,8	77,5	171,3	1150,0	209,4	262,8	141,5	1040,8	100,1	171,5	1282,3	230,2	266,1
7	Kotabaru	131,9	1149,5	157,2	20,7	1438,6	241,1	35,5	130,7	1284,8	179,7	10,2	1595,2	331,4	36,1
8	Tabalong	170,0	1143,3	147,9	119,3	1461,2	335,0	66,6	178,7	1236,1	183,1	116,0	1597,9	372,8	67,5
9	Tanah Bumbu	185,4	1273,8	126,7	104,4	1585,9	237,6	70,2	156,5	1662,9	192,5	246,3	2011,8	518,2	71,9
10	Tanah Laut	128,5	1178,0	251,5	436,9	1558,0	307,4	93,4	169,8	1532,0	169,6	591,7	1871,4	265,9	94,7
11	Tapin	89,8	905,2	172,5	12,9	1167,5	212,6	70,0	102,7	1203,2	133,4	93,1	1439,3	245,3	70,9
12	Banjarbaru	229,8	737,5	120,0	118,0	1087,3	281,4	688,9	268,5	748,4	131,3	169,8	1148,1	360,8	708,1
13	Banjarmasin	277,9	1054,7	245,8	274,9	1578,4	308,8	9734,3	330,7	1073,7	251,3	381,4	1655,7	474,7	9841,8
Kalimantan Timur															
1	Berau	210,4	1773,3	336,0	607,7	2319,7	635,1	10,4	231,0	2137,0	588,6	805,5	2956,6	1286,5	10,7
2	Kutai Barat	96,5	1692,7	221,2	227,5	2010,4	441,5		168,9	2020,8	370,8	228,2	2560,4	560,1	10,8
3	Kutai Kartanegara	303,9	3294,4	457,7	237,8	4056,1	593,8	29,6	552,4	4535,2	657,6	592,5	5745,3	1151,3	30,3
4	Kutai Timur	144,6	2300,8	713,7	31,1	3159,1	843,1	11,7	164,6	2742,1	1017,5	23,7	3924,2	1064,6	12,1
5	Mahakam Ulu	17,4	1058,7	167,8	66,2	1243,9	255,3	1,4	18,5	1238,4	253,3	53,4	1510,2	273,9	1,4
6	Paser	149,4	1509,8	400,1	164,6	2059,2	530,0	25,2	166,2	1741,3	740,9	318,3	2648,3	871,4	25,8
7	Penajam Paser Utara	70,4	975,6	185,7	29,9	1231,7	647,8	54,5	93,5	1233,2	280,1	57,0	1606,8	550,2	55,0
8	Balikpapan	646,9	1263,7	320,2	199,2	2230,7	608,3	1260,6	764,1	1182,6	522,9	291,6	2469,5	687,8	1279,0
9	Bontang	199,5	881,2	173,0	189,4	1253,6	333,7	1067,8	218,7	1028,1	234,7	257,7	1481,6	483,8	1089,4

10	Samarinda	498,9	1510,0	690,8	184,7	2699,7	817,2	1197,6	560,4	1834,5	950,6	367,0	3345,5	1206,8	1218,1
Kalimantan Utara															
1	Bulungan	116,6	912,5	81,0	147,7	1110,1	200,6	10,0	132,6	981,0	119,0	101,7	1232,7	246,0	10,0
2	Malinau	55,0	1242,5	57,7	20,8	1355,2	172,0	2,0	70,4	1335,4	66,0	38,0	1471,7	175,6	2,0
3	Nunukan	81,1	1035,8	73,0	26,9	1189,9	235,3	15,0	104,8	833,7	272,1	13,8	1210,6	183,1	15,0
4	Tana Tidung	18,7	585,2	20,9	38,4	624,8	152,3	6,0	20,3	665,5	37,0	53,5	722,7	200,7	6,0
5	Tarakan	72,4	721,2	91,9	6,6	885,5	255,4	1045,0	73,2	762,7	84,8	9,8	920,7	165,2	1080,0

Lampiran 2 Profil Sumber-Sumber APBD dan Proporsi Belanja Modal (dlm % APBD)
Kabupaten/Kota di Kalimantan

Kabupaten/Kota		Rerata (dalam %) pada rentang 2016-2019			
		PAD	TKD	SiLPA	Bel_Modal
Kalimantan Barat					
1	Bengkayang	4,3	84,0	3,5	23,2
2	Kapuas Hulu	4,9	86,4	3,9	23,0
3	Kayong Utara	3,3	84,1	3,5	26,2
4	Ketapang	7,8	83,0	3,7	24,2
5	Kubu Raya	9,7	76,9	5,1	17,4
6	Landak	6,3	69,7	5,2	23,5
7	Melawi	4,0	83,0	2,7	25,4
8	Mempawah	7,0	80,4	4,5	21,8
9	Sambas	8,5	83,1	2,1	18,7
10	Sanggau	7,1	71,2	10,0	18,4
11	Sekadau	6,1	83,2	3,9	26,5
12	Sintang	7,6	78,3	8,2	19,5
13	Pontianak	27,3	57,8	2,4	27,2
14	Singkawang	14,9	73,4	3,5	24,8
	rerata				
Kalimantan Tengah					
		PAD	TKD	SiLPA	Bel_Modal
1	Barito Selatan	5,9	81,1	8,9	17,0
2	Barito Timur	6,7	77,2	4,8	13,6
3	Barito Utara	4,7	72,9	17,0	22,7
4	Gunung Mas	4,6	83,4	3,3	24,4
5	Kapuas	5,7	78,9	9,1	23,9
6	Katingan	4,2	83,0	8,1	22,9
7	Kotawaringin Barat	11,7	73,1	7,6	26,0
8	Kotawaringin Timur	10,8	59,6	15,4	17,1
9	Lamandau	9,4	75,1	11,5	20,9
10	Murung Raya	4,6	76,9	9,4	18,3
11	Pulang Pisau	4,8	86,8	3,7	27,2
12	Seruyan	6,3	69,3	20,1	24,8
13	Sukamara	5,8	84,2	6,5	33,5
14	Palangkaraya	12,7	73,8	4,6	20,7
	rerata	7,0	76,8	9,3	22,4
Kalimantan Selatan					
		PAD	TKD	SiLPA	Bel_Modal
1	Balangan	5,2	80,4	9,5	21,5
2	Banjarnegara	10,5	74,5	7,7	14,9
3	Barito Kuala	6,8	75,8	7,3	20,0
4	Hulu Sungai Selatan	9,3	74,9	10,3	20,2
5	Hulu Sungai Tengah	8,5	74,1	4,8	22,0

6	Hulu Sungai Utara	8,3	71,3	15,3	17,0
7	Kotabaru	8,0	73,2	9,7	18,6
8	Tabalong	10,2	71,5	10,2	23,7
9	Tanah Bumbu	9,0	76,7	6,7	17,6
10	Tanah Laut	7,1	53,7	30,4	18,9
11	Tapin	6,7	78,8	5,7	19,8
12	Banjarbaru	18,3	61,2	12,3	28,8
13	Banjarmasin	16,6	60,1	12,1	19,0
	rerata	9,6	71,2	10,9	20,2
Kalimantan Timur		PAD	TKD	SiLPA	Bel_Modal
1	Berau	7,0	55,1	25,0	25,8
2	Kutai Barat	5,5	74,2	6,7	20,6
3	Kutai Kartanegara	8,4	74,9	7,6	15,0
4	Kutai Timur	7,9	69,6	0,7	28,8
5	Mahakam Ulu	1,2	75,6	10,5	20,8
6	Paser	6,2	66,4	9,4	23,8
7	Penajam Paser Utara	9,4	73,4	3,2	34,8
8	Balikpapan	27,6	48,8	8,6	24,6
9	Bontang	13,8	64,6	9,1	22,7
10	Samarinda	17,3	54,3	6,6	29,2
	rerata	10,4	65,7	8,7	24,6
Kalimantan Utara		PAD	TKD	SiLPA	Bel_Modal
1	Bulungan	8,7	69,2	14,9	17,3
2	Malinau	4,1	86,7	3,0	17,3
3	Nunukan	6,7	77,9	2,8	19,3
4	Tana Tidung	2,6	75,0	18,8	32,1
5	Tarakan	7,6	76,4	1,4	22,8
	rerata	5,9	77,0	8,2	21,7

Lampiran tabel 3 Proporsi (% APBD) PAD, TKD, SiLPA, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Kalimantan

	<u>PAD</u>					<u>TKD</u>					<u>SiLPA</u>					<u>Bel Modal</u>					
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>rerata</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>rerata</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>rerata</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>rerata</u>	
<u>Kalimantan Barat</u>																					
1 <u>Bengkayang</u>	<u>3.7</u>	<u>4.1</u>	<u>5.0</u>	<u>4.6</u>	<u>4.3</u>	<u>76.5</u>	<u>87.8</u>	<u>85.6</u>	<u>86.2</u>	<u>84.0</u>	<u>8.6</u>	<u>4.0</u>	<u>0.8</u>	<u>0.5</u>	<u>3.5</u>	<u>29.5</u>	<u>28.5</u>	<u>18.7</u>	<u>16.1</u>	<u>23.2</u>	
2 <u>Kapuas Hulu</u>	<u>3.7</u>	<u>7.5</u>	<u>4.3</u>	<u>4.3</u>	<u>4.9</u>	<u>84.0</u>	<u>86.2</u>	<u>86.4</u>	<u>88.8</u>	<u>86.4</u>	<u>5.5</u>	<u>4.2</u>	<u>4.4</u>	<u>1.5</u>	<u>3.9</u>	<u>28.6</u>	<u>20.7</u>	<u>20.5</u>	<u>22.1</u>	<u>23.0</u>	
3 <u>Kayong Utara</u>	<u>1.5</u>	<u>4.5</u>	<u>3.5</u>	<u>3.5</u>	<u>3.3</u>	<u>84.7</u>	<u>84.6</u>	<u>82.5</u>	<u>84.7</u>	<u>84.1</u>	<u>5.0</u>	<u>2.7</u>	<u>1.9</u>	<u>4.3</u>	<u>3.5</u>	<u>31.5</u>	<u>32.0</u>	<u>21.8</u>	<u>19.3</u>	<u>26.2</u>	
4 <u>Ketapang</u>	<u>6.7</u>	<u>8.2</u>	<u>8.6</u>	<u>7.9</u>	<u>7.8</u>	<u>84.3</u>	<u>86.0</u>	<u>81.5</u>	<u>80.2</u>	<u>83.0</u>	<u>5.5</u>	<u>2.8</u>	<u>2.4</u>	<u>4.0</u>	<u>3.7</u>	<u>18.6</u>	<u>22.2</u>	<u>27.9</u>	<u>28.2</u>	<u>24.2</u>	
5 <u>Kubu Raya</u>	<u>7.1</u>	<u>10.2</u>	<u>11.1</u>	<u>10.5</u>	<u>9.7</u>	<u>79.4</u>	<u>76.9</u>	<u>76.8</u>	<u>74.5</u>	<u>76.9</u>	<u>3.0</u>	<u>5.4</u>	<u>5.2</u>	<u>6.9</u>	<u>5.1</u>	<u>21.0</u>	<u>17.2</u>	<u>19.0</u>	<u>12.5</u>	<u>17.4</u>	
6 <u>Landak</u>	<u>3.8</u>	<u>9.2</u>	<u>5.7</u>	<u>6.4</u>	<u>6.3</u>	<u>66.3</u>	<u>73.1</u>	<u>71.2</u>	<u>68.1</u>	<u>69.7</u>	<u>6.8</u>	<u>5.1</u>	<u>4.3</u>	<u>4.5</u>	<u>5.2</u>	<u>34.4</u>	<u>22.8</u>	<u>20.1</u>	<u>16.8</u>	<u>23.5</u>	
7 <u>Melawi</u>	<u>3.1</u>	<u>5.7</u>	<u>3.8</u>	<u>3.3</u>	<u>4.0</u>	<u>80.8</u>	<u>79.5</u>	<u>88.0</u>	<u>83.9</u>	<u>83.0</u>	<u>2.5</u>	<u>0.7</u>	<u>1.2</u>	<u>6.3</u>	<u>2.7</u>	<u>30.7</u>	<u>31.4</u>	<u>16.8</u>	<u>22.7</u>	<u>25.4</u>	
8 <u>Mempawah</u>	<u>5.8</u>	<u>7.1</u>	<u>7.1</u>	<u>8.1</u>	<u>7.0</u>	<u>77.8</u>	<u>83.0</u>	<u>81.4</u>	<u>79.6</u>	<u>80.4</u>	<u>8.3</u>	<u>1.6</u>	<u>3.9</u>	<u>4.1</u>	<u>4.5</u>	<u>34.7</u>	<u>20.7</u>	<u>15.6</u>	<u>16.4</u>	<u>21.8</u>	
9 <u>Sambas</u>	<u>6.4</u>	<u>12.2</u>	<u>7.4</u>	<u>7.9</u>	<u>8.5</u>	<u>85.6</u>	<u>83.9</u>	<u>82.5</u>	<u>80.6</u>	<u>83.1</u>	<u>3.8</u>	<u>0.8</u>	<u>1.6</u>	<u>2.4</u>	<u>2.1</u>	<u>20.6</u>	<u>19.4</u>	<u>16.6</u>	<u>18.1</u>	<u>18.7</u>	
10 <u>Sanggau</u>	<u>5.7</u>	<u>9.1</u>	<u>7.1</u>	<u>6.6</u>	<u>7.1</u>	<u>65.0</u>	<u>70.4</u>	<u>71.2</u>	<u>78.0</u>	<u>71.2</u>	<u>18.5</u>	<u>9.1</u>	<u>4.7</u>	<u>7.6</u>	<u>10.0</u>	<u>20.5</u>	<u>19.3</u>	<u>16.1</u>	<u>17.5</u>	<u>18.4</u>	
11 <u>Sekadau</u>	<u>4.3</u>	<u>8.4</u>	<u>6.7</u>	<u>4.9</u>	<u>6.1</u>	<u>82.6</u>	<u>85.6</u>	<u>84.8</u>	<u>79.9</u>	<u>83.2</u>	<u>8.7</u>	<u>2.1</u>	<u>0.0</u>	<u>4.9</u>	<u>3.9</u>	<u>31.8</u>	<u>28.0</u>	<u>25.7</u>	<u>20.7</u>	<u>26.5</u>	
12 <u>Sintang</u>	<u>5.8</u>	<u>5.5</u>	<u>11.3</u>	<u>7.8</u>	<u>7.6</u>	<u>80.5</u>	<u>82.9</u>	<u>75.3</u>	<u>74.4</u>	<u>78.3</u>	<u>9.9</u>	<u>4.8</u>	<u>7.2</u>	<u>11.1</u>	<u>8.2</u>	<u>23.8</u>	<u>21.2</u>	<u>15.8</u>	<u>17.1</u>	<u>19.5</u>	
13 <u>Pontianak</u>	<u>26.6</u>	<u>30.4</u>	<u>26.1</u>	<u>26.1</u>	<u>27.3</u>	<u>61.1</u>	<u>58.3</u>	<u>56.9</u>	<u>54.6</u>	<u>57.8</u>	<u>3.2</u>	<u>1.3</u>	<u>1.3</u>	<u>3.9</u>	<u>2.4</u>	<u>27.6</u>	<u>28.4</u>	<u>29.1</u>	<u>23.8</u>	<u>27.2</u>	
14 <u>Singkawang</u>	<u>12.3</u>	<u>15.5</u>	<u>14.4</u>	<u>17.2</u>	<u>14.9</u>	<u>76.4</u>	<u>75.6</u>	<u>72.6</u>	<u>68.9</u>	<u>73.4</u>	<u>5.9</u>	<u>0.4</u>	<u>3.2</u>	<u>4.6</u>	<u>3.5</u>	<u>27.6</u>	<u>23.4</u>	<u>26.7</u>	<u>21.6</u>	<u>24.8</u>	
<u>rerata</u>	<u>6.9</u>	<u>9.8</u>	<u>8.7</u>	<u>8.5</u>		<u>77.5</u>	<u>79.6</u>	<u>78.3</u>	<u>77.3</u>		<u>6.8</u>	<u>3.2</u>	<u>3.0</u>	<u>4.7</u>		<u>27.2</u>	<u>24.0</u>	<u>20.8</u>	<u>19.5</u>		
<u>Kalimantan Tengah</u>																					
1 <u>Barito Selatan</u>	<u>4.3</u>	<u>4.9</u>	<u>7.5</u>	<u>7.0</u>	<u>5.9</u>	<u>81.6</u>	<u>82.5</u>	<u>80.8</u>	<u>79.2</u>	<u>81.1</u>	<u>9.6</u>	<u>8.3</u>	<u>9.0</u>	<u>8.7</u>	<u>8.9</u>	<u>15.9</u>	<u>13.1</u>	<u>18.7</u>	<u>20.4</u>	<u>17.0</u>	
2 <u>Barito Timur</u>	<u>3.6</u>	<u>11.7</u>	<u>5.5</u>	<u>6.1</u>	<u>6.7</u>	<u>72.8</u>	<u>70.7</u>	<u>80.0</u>	<u>85.5</u>	<u>77.2</u>	<u>9.8</u>	<u>5.3</u>	<u>1.0</u>	<u>3.2</u>	<u>4.8</u>	<u>16.7</u>	<u>14.8</u>	<u>10.5</u>	<u>12.4</u>	<u>13.6</u>	
3 <u>Barito Utara</u>	<u>4.1</u>	<u>4.8</u>	<u>5.0</u>	<u>5.1</u>	<u>4.7</u>	<u>78.8</u>	<u>70.0</u>	<u>69.7</u>	<u>73.0</u>	<u>72.9</u>	<u>12.8</u>	<u>20.9</u>	<u>20.6</u>	<u>13.8</u>	<u>17.0</u>	<u>22.2</u>	<u>27.9</u>	<u>20.1</u>	<u>20.6</u>	<u>22.7</u>	
4 <u>Gunung Mas</u>	<u>3.5</u>	<u>3.4</u>	<u>4.2</u>	<u>7.2</u>	<u>4.6</u>	<u>77.9</u>	<u>79.8</u>	<u>89.9</u>	<u>85.9</u>	<u>83.4</u>	<u>7.3</u>	<u>4.3</u>	<u>0.8</u>	<u>0.9</u>	<u>3.3</u>	<u>27.7</u>	<u>29.0</u>	<u>25.1</u>	<u>16.0</u>	<u>24.4</u>	
5 <u>Kapuas</u>	<u>4.4</u>	<u>4.9</u>	<u>5.8</u>	<u>7.8</u>	<u>5.7</u>	<u>77.3</u>	<u>78.1</u>	<u>79.8</u>	<u>80.5</u>	<u>78.9</u>	<u>12.7</u>	<u>10.6</u>	<u>8.0</u>	<u>5.0</u>	<u>9.1</u>	<u>26.5</u>	<u>24.2</u>	<u>23.1</u>	<u>22.0</u>	<u>23.9</u>	
6 <u>Katingan</u>	<u>3.6</u>	<u>4.1</u>	<u>3.9</u>	<u>4.9</u>	<u>4.2</u>	<u>79.7</u>	<u>82.1</u>	<u>85.0</u>	<u>85.2</u>	<u>83.0</u>	<u>12.1</u>	<u>9.0</u>	<u>6.6</u>	<u>4.6</u>	<u>8.1</u>	<u>24.2</u>	<u>28.4</u>	<u>25.0</u>	<u>14.0</u>	<u>22.9</u>	
7 <u>Kotawaringin Barat</u>	<u>10.1</u>	<u>12.5</u>	<u>12.8</u>	<u>11.5</u>	<u>11.7</u>	<u>74.4</u>	<u>74.7</u>	<u>70.9</u>	<u>72.2</u>	<u>73.1</u>	<u>7.0</u>	<u>7.0</u>	<u>8.2</u>	<u>8.2</u>	<u>7.6</u>	<u>26.9</u>	<u>28.5</u>	<u>24.2</u>	<u>24.2</u>	<u>26.0</u>	
8 <u>Kotawaringin Timur</u>	<u>10.1</u>	<u>13.0</u>	<u>9.9</u>	<u>10.2</u>	<u>10.8</u>	<u>64.9</u>	<u>58.4</u>	<u>57.8</u>	<u>57.4</u>	<u>59.6</u>	<u>9.8</u>	<u>16.8</u>	<u>18.5</u>	<u>16.5</u>	<u>15.4</u>	<u>15.7</u>	<u>13.5</u>	<u>17.0</u>	<u>22.3</u>	<u>17.1</u>	

9	<u>Lamandau</u>	<u>4.3</u>	<u>16.1</u>	<u>9.5</u>	<u>7.5</u>	<u>9.4</u>	<u>80.1</u>	<u>67.4</u>	<u>75.6</u>	<u>77.5</u>	<u>75.1</u>	<u>11.8</u>	<u>14.1</u>	<u>10.6</u>	<u>9.6</u>	<u>11.5</u>	<u>31.2</u>	<u>23.2</u>	<u>15.0</u>	<u>14.1</u>	<u>20.9</u>
10	<u>Murung Raya</u>	<u>2.4</u>	<u>5.5</u>	<u>4.4</u>	<u>6.3</u>	<u>4.6</u>	<u>73.6</u>	<u>77.0</u>	<u>74.9</u>	<u>81.9</u>	<u>76.9</u>	<u>14.9</u>	<u>7.4</u>	<u>9.4</u>	<u>5.9</u>	<u>9.4</u>	<u>27.7</u>	<u>17.5</u>	<u>17.0</u>	<u>11.0</u>	<u>18.3</u>
11	<u>Pulang Pisau</u>	<u>3.6</u>	<u>3.7</u>	<u>4.1</u>	<u>7.7</u>	<u>4.8</u>	<u>85.7</u>	<u>88.4</u>	<u>90.5</u>	<u>82.6</u>	<u>86.8</u>	<u>5.7</u>	<u>3.5</u>	<u>0.9</u>	<u>4.5</u>	<u>3.7</u>	<u>33.0</u>	<u>31.4</u>	<u>24.4</u>	<u>19.9</u>	<u>27.2</u>
12	<u>Seruyan</u>	<u>4.5</u>	<u>8.3</u>	<u>6.6</u>	<u>6.0</u>	<u>6.3</u>	<u>70.6</u>	<u>71.1</u>	<u>69.4</u>	<u>66.0</u>	<u>69.3</u>	<u>17.8</u>	<u>17.8</u>	<u>20.1</u>	<u>24.5</u>	<u>20.1</u>	<u>28.2</u>	<u>24.0</u>	<u>22.3</u>	<u>24.5</u>	<u>24.8</u>
13	<u>Sukamara</u>	<u>4.9</u>	<u>7.0</u>	<u>6.2</u>	<u>5.0</u>	<u>5.8</u>	<u>86.7</u>	<u>84.4</u>	<u>85.4</u>	<u>80.4</u>	<u>84.2</u>	<u>6.2</u>	<u>5.7</u>	<u>3.8</u>	<u>10.2</u>	<u>6.5</u>	<u>43.3</u>	<u>35.4</u>	<u>30.6</u>	<u>24.8</u>	<u>33.5</u>
14	<u>Palangkaraya</u>	<u>9.7</u>	<u>13.4</u>	<u>13.4</u>	<u>14.2</u>	<u>12.7</u>	<u>72.0</u>	<u>75.4</u>	<u>76.3</u>	<u>71.3</u>	<u>73.8</u>	<u>8.4</u>	<u>3.0</u>	<u>0.5</u>	<u>6.4</u>	<u>4.6</u>	<u>23.2</u>	<u>21.4</u>	<u>20.1</u>	<u>18.4</u>	<u>20.7</u>
	rerata	<u>5.2</u>	<u>8.1</u>	<u>7.1</u>	<u>7.6</u>		<u>76.9</u>	<u>75.7</u>	<u>77.6</u>	<u>77.0</u>		<u>10.4</u>	<u>9.6</u>	<u>8.4</u>	<u>8.7</u>		<u>25.9</u>	<u>23.7</u>	<u>20.9</u>	<u>18.9</u>	

Kalimantan Selatan

1	<u>Balangan</u>	<u>4.5</u>	<u>6.5</u>	<u>5.0</u>	<u>4.9</u>	<u>5.2</u>	<u>88.3</u>	<u>71.2</u>	<u>82.5</u>	<u>79.5</u>	<u>80.4</u>	<u>3.6</u>	<u>17.8</u>	<u>7.2</u>	<u>9.5</u>	<u>9.5</u>	<u>24.9</u>	<u>24.2</u>	<u>19.2</u>	<u>17.8</u>	<u>21.5</u>
2	<u>Banjar</u>	<u>10.3</u>	<u>10.1</u>	<u>11.0</u>	<u>10.7</u>	<u>10.5</u>	<u>77.8</u>	<u>72.5</u>	<u>75.4</u>	<u>72.3</u>	<u>74.5</u>	<u>7.1</u>	<u>8.5</u>	<u>6.2</u>	<u>9.1</u>	<u>7.7</u>	<u>16.1</u>	<u>13.1</u>	<u>14.1</u>	<u>16.2</u>	<u>14.9</u>
3	<u>Barito Kuala</u>	<u>4.5</u>	<u>7.2</u>	<u>10.1</u>	<u>5.6</u>	<u>6.8</u>	<u>84.2</u>	<u>79.1</u>	<u>65.5</u>	<u>74.4</u>	<u>75.8</u>	<u>7.3</u>	<u>4.9</u>	<u>6.2</u>	<u>10.8</u>	<u>7.3</u>	<u>30.1</u>	<u>16.7</u>	<u>14.1</u>	<u>19.2</u>	<u>20.0</u>
4	<u>Hulu Sungai Selatan</u>	<u>7.6</u>	<u>10.6</u>	<u>9.2</u>	<u>10.0</u>	<u>9.3</u>	<u>82.0</u>	<u>70.1</u>	<u>75.6</u>	<u>71.8</u>	<u>74.9</u>	<u>6.5</u>	<u>14.6</u>	<u>9.0</u>	<u>11.1</u>	<u>10.3</u>	<u>24.7</u>	<u>17.7</u>	<u>18.4</u>	<u>20.3</u>	<u>20.2</u>
5	<u>Hulu Sungai Tengah</u>	<u>7.4</u>	<u>10.0</u>	<u>7.8</u>	<u>8.7</u>	<u>8.5</u>	<u>77.3</u>	<u>79.8</u>	<u>74.0</u>	<u>65.2</u>	<u>74.1</u>	<u>3.9</u>	<u>5.2</u>	<u>1.0</u>	<u>9.0</u>	<u>4.8</u>	<u>25.8</u>	<u>27.3</u>	<u>17.4</u>	<u>17.5</u>	<u>22.0</u>
6	<u>Hulu Sungai Utara</u>	<u>5.5</u>	<u>10.1</u>	<u>7.9</u>	<u>9.7</u>	<u>8.3</u>	<u>71.8</u>	<u>68.7</u>	<u>73.2</u>	<u>71.6</u>	<u>71.3</u>	<u>19.7</u>	<u>16.8</u>	<u>13.0</u>	<u>11.8</u>	<u>15.3</u>	<u>21.8</u>	<u>14.6</u>	<u>15.8</u>	<u>15.8</u>	<u>17.0</u>
7	<u>Kotabaru</u>	<u>7.8</u>	<u>7.2</u>	<u>9.0</u>	<u>8.1</u>	<u>8.0</u>	<u>65.6</u>	<u>68.2</u>	<u>78.8</u>	<u>80.0</u>	<u>73.2</u>	<u>21.5</u>	<u>15.4</u>	<u>1.4</u>	<u>0.6</u>	<u>9.7</u>	<u>21.0</u>	<u>16.2</u>	<u>16.5</u>	<u>20.6</u>	<u>18.6</u>
8	<u>Tabalong</u>	<u>8.2</u>	<u>11.4</u>	<u>10.8</u>	<u>10.4</u>	<u>10.2</u>	<u>77.3</u>	<u>64.3</u>	<u>72.3</u>	<u>72.1</u>	<u>71.5</u>	<u>9.0</u>	<u>17.3</u>	<u>7.5</u>	<u>6.8</u>	<u>10.2</u>	<u>26.5</u>	<u>25.2</u>	<u>21.2</u>	<u>21.8</u>	<u>23.7</u>
9	<u>Tanah Bumbu</u>	<u>7.7</u>	<u>10.5</u>	<u>11.0</u>	<u>6.9</u>	<u>9.0</u>	<u>82.0</u>	<u>76.0</u>	<u>75.4</u>	<u>73.6</u>	<u>76.7</u>	<u>2.8</u>	<u>7.1</u>	<u>6.2</u>	<u>10.9</u>	<u>6.7</u>	<u>18.1</u>	<u>15.3</u>	<u>14.1</u>	<u>22.9</u>	<u>17.6</u>
10	<u>Tanah Laut</u>	<u>6.0</u>	<u>9.1</u>	<u>6.4</u>	<u>6.9</u>	<u>7.1</u>	<u>49.1</u>	<u>44.6</u>	<u>59.1</u>	<u>62.2</u>	<u>53.7</u>	<u>41.7</u>	<u>33.8</u>	<u>21.9</u>	<u>24.0</u>	<u>30.4</u>	<u>24.7</u>	<u>24.7</u>	<u>15.4</u>	<u>10.8</u>	<u>18.9</u>
11	<u>Tapin</u>	<u>4.6</u>	<u>8.0</u>	<u>7.6</u>	<u>6.7</u>	<u>6.7</u>	<u>80.9</u>	<u>79.1</u>	<u>76.7</u>	<u>78.5</u>	<u>78.8</u>	<u>9.5</u>	<u>6.3</u>	<u>1.1</u>	<u>6.1</u>	<u>5.7</u>	<u>27.1</u>	<u>18.1</u>	<u>18.0</u>	<u>16.0</u>	<u>19.8</u>
12	<u>Banjarbaru</u>	<u>13.3</u>	<u>20.4</u>	<u>19.1</u>	<u>20.4</u>	<u>18.3</u>	<u>64.8</u>	<u>62.1</u>	<u>61.2</u>	<u>56.8</u>	<u>61.2</u>	<u>16.0</u>	<u>10.4</u>	<u>9.8</u>	<u>12.9</u>	<u>12.3</u>	<u>37.3</u>	<u>27.2</u>	<u>23.3</u>	<u>27.4</u>	<u>28.8</u>
13	<u>Banjarmasin</u>	<u>15.1</u>	<u>20.2</u>	<u>15.0</u>	<u>16.2</u>	<u>16.6</u>	<u>68.4</u>	<u>62.3</u>	<u>56.9</u>	<u>52.7</u>	<u>60.1</u>	<u>7.1</u>	<u>7.7</u>	<u>14.8</u>	<u>18.7</u>	<u>12.1</u>	<u>22.0</u>	<u>14.1</u>	<u>16.7</u>	<u>23.3</u>	<u>19.0</u>
	rerata	<u>7.9</u>	<u>10.9</u>	<u>10.0</u>	<u>9.6</u>		<u>74.6</u>	<u>69.1</u>	<u>71.3</u>	<u>70.1</u>		<u>12.0</u>	<u>12.8</u>	<u>8.1</u>	<u>10.9</u>		<u>24.6</u>	<u>19.6</u>	<u>17.2</u>	<u>19.2</u>	

Kalimantan Timur

1	<u>Berau</u>	<u>7.1</u>	<u>7.5</u>	<u>7.2</u>	<u>6.1</u>	<u>7.0</u>	<u>53.4</u>	<u>49.6</u>	<u>60.6</u>	<u>56.8</u>	<u>55.1</u>	<u>31.9</u>	<u>25.7</u>	<u>20.8</u>	<u>21.4</u>	<u>25.0</u>	<u>26.8</u>	<u>20.7</u>	<u>21.7</u>	<u>34.2</u>	<u>25.8</u>
2	<u>Kutai Barat</u>	<u>4.4</u>	<u>7.4</u>	<u>4.3</u>	<u>6.1</u>	<u>5.5</u>	<u>82.4</u>	<u>66.3</u>	<u>75.6</u>	<u>72.5</u>	<u>74.2</u>	<u>2.9</u>	<u>5.5</u>	<u>10.2</u>	<u>8.2</u>	<u>6.7</u>	<u>23.1</u>	<u>19.4</u>	<u>19.7</u>	<u>20.1</u>	<u>20.6</u>
3	<u>Kutai Kartanegara</u>	<u>6.1</u>	<u>11.5</u>	<u>7.1</u>	<u>8.7</u>	<u>8.4</u>	<u>81.6</u>	<u>69.7</u>	<u>76.7</u>	<u>71.6</u>	<u>74.9</u>	<u>5.0</u>	<u>10.4</u>	<u>5.5</u>	<u>9.3</u>	<u>7.6</u>	<u>13.8</u>	<u>14.4</u>	<u>13.8</u>	<u>18.2</u>	<u>15.0</u>
4	<u>Kutai Timur</u>	<u>15.2</u>	<u>7.5</u>	<u>4.5</u>	<u>4.2</u>	<u>7.9</u>	<u>70.7</u>	<u>65.9</u>	<u>72.1</u>	<u>69.5</u>	<u>69.6</u>	<u>0.6</u>	<u>0.7</u>	<u>1.0</u>	<u>0.6</u>	<u>0.7</u>	<u>35.8</u>	<u>26.0</u>	<u>26.4</u>	<u>27.0</u>	<u>28.8</u>
5	<u>Mahakam Ulu</u>	<u>1.5</u>	<u>0.9</u>	<u>1.3</u>	<u>1.2</u>	<u>1.2</u>	<u>78.8</u>	<u>63.6</u>	<u>80.8</u>	<u>79.2</u>	<u>75.6</u>	<u>10.9</u>	<u>22.7</u>	<u>5.1</u>	<u>3.4</u>	<u>10.5</u>	<u>23.0</u>	<u>23.1</u>	<u>19.5</u>	<u>17.5</u>	<u>20.8</u>
6	<u>Paser</u>	<u>6.3</u>	<u>6.0</u>	<u>6.7</u>	<u>5.6</u>	<u>6.2</u>	<u>80.1</u>	<u>59.0</u>	<u>67.9</u>	<u>58.7</u>	<u>66.4</u>	<u>1.4</u>	<u>18.0</u>	<u>7.4</u>	<u>10.7</u>	<u>9.4</u>	<u>17.5</u>	<u>24.5</u>	<u>23.8</u>	<u>29.4</u>	<u>23.8</u>

7	<u>Penajam Paser Utara</u>	<u>16.5</u>	<u>9.9</u>	<u>5.6</u>	<u>5.6</u>	<u>9.4</u>	<u>72.6</u>	<u>69.4</u>	<u>77.3</u>	<u>74.1</u>	<u>73.4</u>	<u>1.8</u>	<u>5.3</u>	<u>2.4</u>	<u>3.4</u>	<u>3.2</u>	<u>29.9</u>	<u>24.8</u>	<u>51.3</u>	<u>33.1</u>	<u>34.8</u>
8	<u>Balikpapan</u>	<u>25.2</u>	<u>31.0</u>	<u>26.6</u>	<u>27.7</u>	<u>27.6</u>	<u>51.5</u>	<u>49.1</u>	<u>52.0</u>	<u>42.8</u>	<u>48.8</u>	<u>10.3</u>	<u>5.2</u>	<u>8.2</u>	<u>10.6</u>	<u>8.6</u>	<u>25.4</u>	<u>22.9</u>	<u>25.0</u>	<u>24.9</u>	<u>24.6</u>
9	<u>Bontang</u>	<u>13.8</u>	<u>14.9</u>	<u>13.8</u>	<u>12.6</u>	<u>13.8</u>	<u>74.4</u>	<u>63.9</u>	<u>61.1</u>	<u>59.1</u>	<u>64.6</u>	<u>2.1</u>	<u>6.5</u>	<u>13.1</u>	<u>14.8</u>	<u>9.1</u>	<u>20.1</u>	<u>19.5</u>	<u>23.1</u>	<u>27.8</u>	<u>22.7</u>
10	<u>Samarinda</u>	<u>15.6</u>	<u>21.1</u>	<u>17.3</u>	<u>15.1</u>	<u>17.3</u>	<u>64.6</u>	<u>50.7</u>	<u>52.4</u>	<u>49.4</u>	<u>54.3</u>	<u>2.9</u>	<u>7.3</u>	<u>6.4</u>	<u>9.9</u>	<u>6.6</u>	<u>27.7</u>	<u>28.4</u>	<u>28.3</u>	<u>32.5</u>	<u>29.2</u>
	<u>rerata</u>	<u>11.2</u>	<u>11.8</u>	<u>9.4</u>	<u>9.3</u>		<u>71.0</u>	<u>60.7</u>	<u>67.7</u>	<u>63.4</u>		<u>7.0</u>	<u>10.7</u>	<u>8.0</u>	<u>9.2</u>		<u>24.3</u>	<u>22.4</u>	<u>25.3</u>	<u>26.5</u>	
<u>Kalimantan Utara</u>																					
1	<u>Bulungan</u>	<u>6.5</u>	<u>9.0</u>	<u>9.3</u>	<u>9.9</u>	<u>8.7</u>	<u>66.1</u>	<u>64.7</u>	<u>72.5</u>	<u>73.5</u>	<u>69.2</u>	<u>21.2</u>	<u>18.9</u>	<u>11.7</u>	<u>7.6</u>	<u>14.9</u>	<u>22.0</u>	<u>12.8</u>	<u>16.0</u>	<u>18.4</u>	<u>17.3</u>
2	<u>Malinau</u>	<u>3.5</u>	<u>4.2</u>	<u>4.0</u>	<u>4.7</u>	<u>4.1</u>	<u>83.7</u>	<u>84.4</u>	<u>90.3</u>	<u>88.5</u>	<u>86.7</u>	<u>1.4</u>	<u>6.5</u>	<u>1.5</u>	<u>2.5</u>	<u>3.0</u>	<u>21.7</u>	<u>23.4</u>	<u>12.5</u>	<u>11.6</u>	<u>17.3</u>
3	<u>Nunukan</u>	<u>5.4</u>	<u>6.3</u>	<u>6.7</u>	<u>8.6</u>	<u>6.7</u>	<u>81.2</u>	<u>77.2</u>	<u>85.1</u>	<u>68.1</u>	<u>77.9</u>	<u>2.3</u>	<u>5.5</u>	<u>2.2</u>	<u>1.1</u>	<u>2.8</u>	<u>21.5</u>	<u>21.4</u>	<u>19.3</u>	<u>15.0</u>	<u>19.3</u>
4	<u>Tana Tidung</u>	<u>1.8</u>	<u>3.0</u>	<u>2.8</u>	<u>2.6</u>	<u>2.6</u>	<u>60.5</u>	<u>65.5</u>	<u>88.2</u>	<u>85.7</u>	<u>75.0</u>	<u>35.4</u>	<u>27.2</u>	<u>5.8</u>	<u>6.9</u>	<u>18.8</u>	<u>36.2</u>	<u>43.2</u>	<u>23.0</u>	<u>25.9</u>	<u>32.1</u>
5	<u>Tarakan</u>	<u>6.0</u>	<u>8.4</u>	<u>8.1</u>	<u>7.9</u>	<u>7.6</u>	<u>68.1</u>	<u>74.6</u>	<u>80.8</u>	<u>82.0</u>	<u>76.4</u>	<u>2.2</u>	<u>1.8</u>	<u>0.7</u>	<u>1.1</u>	<u>1.4</u>	<u>22.8</u>	<u>21.9</u>	<u>28.6</u>	<u>17.8</u>	<u>22.8</u>
	<u>rerata</u>	<u>4.6</u>	<u>6.2</u>	<u>6.2</u>	<u>6.7</u>		<u>71.9</u>	<u>73.3</u>	<u>83.4</u>	<u>79.6</u>		<u>12.5</u>	<u>12.0</u>	<u>4.4</u>	<u>3.8</u>		<u>24.8</u>	<u>24.5</u>	<u>19.9</u>	<u>17.7</u>	

Lampiran 4 Uji asumsi klasik dengan Kolmogorov-Smirnov test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	4.5234079
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.050
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 5 Uji hipotesis variabel independen terhadap variabel dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.673	925.1734

a. Predictors: (Constant), Kep_Pddk, SiLPA, TKD, PAD

b. Dependent Variable: Bel_Modal

Lampiran 6 Nilai Signifikansi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	100492831.845	4	25123207.961	29.351	.000 ^b
Residual	43653235.709	51	855945.798		
Total	144146067.554	55			

a. Dependent Variable: Bel_Modal

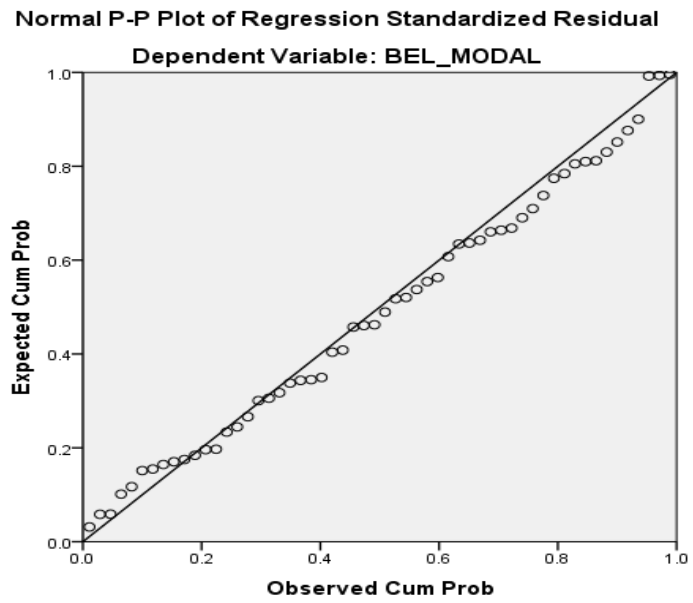
b. Predictors: (Constant), Kep_Pddk, SiLPA, TKD, PAD

Lampiran 7 Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

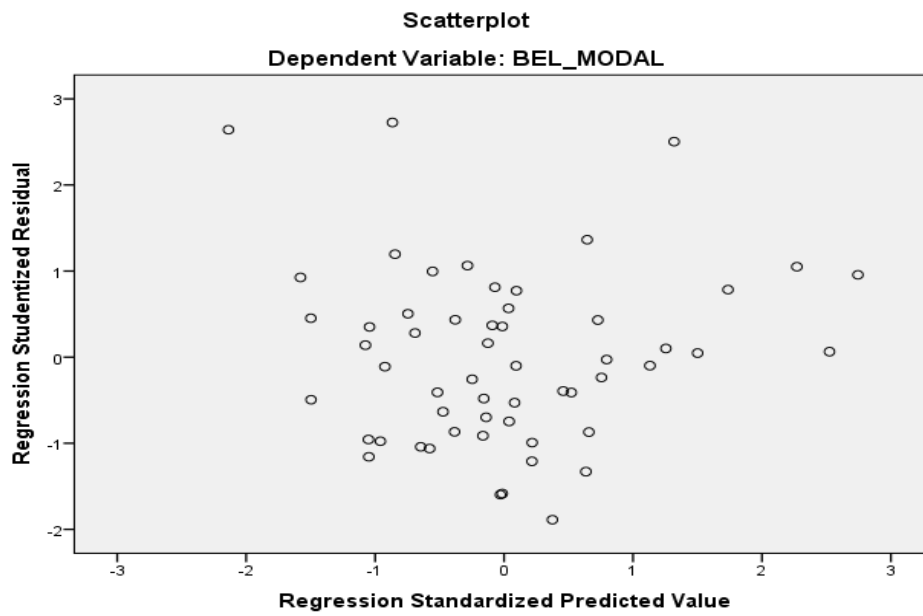
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	490.065	341.993		1.433	.158
PAD	.603	.139	.439	4.334	.000
TKD	.172	.033	.483	5.211	.000
SiLPA	.177	.098	.151	1.813	.076
Kep_Pddk	-.009	.010	-.087	-.956	.343

a. Dependent Variable: Bel_Modal



Lampiran 8 Sebaran residual di sekitar garis normal P-P Plot



Lampiran 9 Sebaran residual data di sekitar Scatterplot